STRATEGI KOMUNIKASI
INSPEKTORAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DALAM UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI
(Studi pada Program Penyuluh Anti Korupsi dan *Monitoring Center For Prevention*)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Komunikasi
pada Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Oleh
FADILA AGVINA
20321234

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA
2024

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

STRATEGI KOMUNIKASI INSPEKTORAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI
(Studi pada Program Penyuluh Anti Korupsi dan *Monitoring Center For Prevention*)

Oleh:
FADILA AGVINA
20321234

Telah disetujui dan disahkan oleh Dosen Pembimbing Skripsi

Tanggal: 9 September 2024

Mengetahui
Dosen Pembimbing Skripsi

Nadia Wasta Utami, S.I.Kom, M.A.
NIDN. 0505068902

ii

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

STRATEGI KOMUNIKASI INSPEKTORAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI
(Studi pada Program Penyuluh Anti Korupsi dan *Monitoring Center For Prevention*)

Disusun oleh:
FADILA AGVINA
20321234

Telah Diuji dan disahkan oleh Dosen Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Pada Hari : Senin
Tanggal : 9 September 2024

Dosen Penguji:

Ketua : **Nadia Wasta Utami, S.I.Kom, M.A.** (_____)
NIDN. 0505068902

Anggota : **Dr. Subhan Afifi, S.Sos., M.Si** (_____)
NIDN. 0528097401

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Iwan Awaluddin Yusuf, S.IP., M.Si., Ph.D
NIDN. 0506038201

B

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

INSPEKTORAT

ꦤꦶꦱ꧀ꦥꦼꦏ꧀ꦠꦺꦴꦫꦠ꧀

Jalan Cendana Nomor 40 Yogyakarta Telepon (0274) 562009 Faksimile (0274) 512567
Website: http://inspektorat.jogjaprov.go.id Email: inspektorat@jogjaprov.go.id Kode Pos 55166

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 400.3.8.10/171

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama	:	Fadila Agvina
NIM	:	20321234
Program Studi	:	Ilmu Komunikasi
Fakultas	:	Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia

Telah selesai melakukan penelitian skripsi dengan judul "Strategi Komunikasi Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi (Studi pada Program Penyuluh Anti Korupsi (PAK) dan *Monitoring Center for Prevention* (MCP)) di Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 10 - 07 - 2024

INSPEKTUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MUHAMMAD SETIADI, S.Pt., M.Acc

NIP. 19671004199203 1005

PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fadila Agvina

Nomor Mahasiswa : 20321234

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa:

1. Selama menyusun skripsi ini saya tidak melakukan tindak pelanggaran akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia.
2. Karena itu, skripsi ini merupakan karya ilmiah saya sebagai penulis, bukan karya jiplakan atau karya orang lain.
3. Apabila di kemudian hari, setelah saya lulus dari Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia, ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini, saya setuju dengan sesungguhnya.

Yogyakarta, 20 September 2024
Yang menyatakan,



(Fadila Agvina)
20321234

MOTTO

“Segala Puji bagi ALLAH, Tuhan Semesta Alam“

“Awali semua dengan Bismillah“
“Bismillahirrahmanirrahim, Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang“

“Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah SWT hati akan menjadi tentram”
(QS. Ar-rad: 28)

“Semua itu pasti ada hikmahnya. Tugas manusia adalah berusaha, Allah yang menentukan“
(Mama Hastanti)

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada:

1. Mama, Mbak Vit, tercinta dan ayah
2. Para penekun pengetahuan

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga dapat terselesaikannya penulisan karya skripsi yang berjudul "Strategi Komunikasi Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Upaya Pemberantasan Korupsi (Studi pada Program Penyuluh Anti Korupsi (PAK) dan Monitoring Center For Prevention (MCP))". Penyusunan karya skripsi ini dilakukan untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia.

Penelitian ini ditujukan untuk melihat strategi komunikasi dari Inspektorat DIY dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi melalui program PAK dan MCP. Terdapat beragam upaya dengan memanfaatkan berbagai jenis komunikasi untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Inspektorat DIY melakukan upaya pemberantasan korupsi dengan tujuan untuk dapat menyebarkan pesan anti korupsi kepada berbagai kalangan masyarakat.

Dalam penyusunan hingga terselesaikannya karya skripsi ini, tidak terlepas dari dukungan dari berbagai pihak. Penulis menghaturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dekan Dr.Phil.Qurotul Uyun,S.Psi.,M.Si., Psikologi selaku dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Iwan Awaluddin Yusuf, S.IP., M.Si., Ph.D, selaku ketua Program Studi Ilmu Komunikasi
3. Ibu Nadia Wasta Utami, S.I.Kom., MA, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan nasihat kepada peneliti selama proses penyusunan penelitian ini
4. Bapak Dr.Subhan Afifi,S.Sos.,M.Si. selaku dosen penguji, terima kasih atas ilmu dan bimbingannya
5. Seluruh dosen pengajar dan karyawan di Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu dan pengalaman bermanfaat selama peneliti menempuh studi S1
6. Kedua orang tua penulis yaitu Mama dan ayah. Terima kasih Mama atas dukungan, motivasi, doa, kebahagiaan, dan kasih sayang yang tiada henti-hentinya selalu diberikan
7. Kakak, mbak Vit yang juga turut memberikan kasih sayang, dukungan, kebahagiaan, dan doa

8. Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta, utamanya Bapak Bernardinus Norowisnu, S.Kom., M.Hum, Bapak Maharyo Widanto, S.T., M.M., dan Bapak ANT. Totok Purwoirawan, S.K.M., M.Acc yang telah membantu saya dalam memperoleh data penelitian pada karya skripsi ini
9. Seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan doa serta dukungan kepada peneliti untuk dapat menyelesaikan penelitian karya skripsi ini.

Peneliti menyadari karya skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari segi penyusunan, bahasa, maupun penulisannya. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga karya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak manapun, terutama bagi penulis selanjutnya.

Yogyakarta, 08 September 2024

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **ii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
ABSTRAK ..... **xii**
DAFTAR TABEL ..... **xi**
DAFTAR GAMBAR ..... **xi**
BAB I **14**
PENDAHULUAN **14**
A. Latar belakang 14
B. Rumusan Masalah: 3
C. Tujuan Penelitian 3
D. Manfaat Penelitian 3
1. Manfaat Teoritis 3
2. Manfaat Praktis 3
E. Tinjauan Pustaka 4
1. Penelitian Terdahulu 4
2. Kerangka Konsep 6
F. Metode Penelitian 12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 12
2. Waktu dan Lokasi Penelitian 12
3. Narasumber Penelitian 12
4. Teknik Pengumpulan Data 13
5. Teknik Analisis Data 13
BAB II **15**
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN **15**
A. Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta 15
B. Visi Misi 15
C. Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta 17
D. Tugas dan Fungsi Inspektorat 17
E. Program Penyuluh Anti Korupsi (PAK) dan *Monitoring Center For Prevention* (MCP) 19
1. Program Penyuluh Anti Korupsi (PAK) 19
2. Monitoring Center For Prevention (MCP) 20
BAB III **21**
TEMUAN DAN PEMBAHASAN **21**
A. Temuan 21
1. Dasar Pelaksanaan Program PAK dan MCP 21

2. Perencanaan Komunikasi Inspektorat DIY dalam Upaya Pemberantasan Korupsi melalui Program Penyuluh Anti Korupsi (PAK) dan Monitoring Center For Prevention (MCP) 24
3. Strategi Komunikasi Inspektorat DIY dalam Upaya Pemberantasan Korupsi melalui Program Penyuluh Anti Korupsi (PAK) dan Monitoring Center For Prevention (MCP) 35
4. Faktor Pendukung dan Penghambat 53
B. Pembahasan 53
1. Pentingnya Perencanaan Komunikasi 53
2. Analisis Strategi Komunikasi 55
3. Analisis SWOT 58
1. Konten instagram kurang menarik, dimana dokumentasi kegiatan yang dipublikasikan melalui Instagram terlihat terlalu sederhana 58
2. Dalam pelaksanaan sosialisasi, komunikator tidak memastikan bahwa pesan yang disampaikan telah dipahami oleh komunikan 58
1. Penyampaian pesan anti korupsi dan dokumentasi kegiatan yang dilakukan melalui media Instagram terlihat terlalu sederhana dan menjadi kurang menarik. Konten yang kurang menarik dapat mempengaruhi minat masyarakat untuk mengikuti kegiatan program pemberantasan korupsi 59
2. Tidak adanya suatu cara yang dilakukan komunikator untuk memastikan bahwa komunikan telah memahami isi pesan yang disampaikan dapat berpengaruh pada evaluasi pelaksanaan untuk program selanjutnya. Sehingga peningkatan yang seharusnya dapat dilakukan menjadi tidak dapat dimaksimalkan 59
BAB IV 60
PENUTUP 60
A. Kesimpulan 60
B. Keterbatasan Penelitian 61
C. Saran 61
1. Bagi Inspektorat DIY 61
2. Bagi Peneliti Selanjutnya 61
Daftar Pustaka 62
LAMPIRAN 65

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Nama Narasumber 19

Tabel 3.2 Analisis SWOT.....52

Tabel 3.3 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat berdasarkan Analisis SWOT 52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Surat Undangan KPK Nomor B/1404/DKM.00.04/10-17/03/.....23
Gambar 3. 2 Buku "Pedoman Penilaian Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah melalui MCP" 24
Gambar 3. 3 Gerakan Gestur Tubuh "Tolak Korupsi" 30
Gambar 3. 4 TVRI Yogyakarta "Peran Serta Masyarakat dalam Membangun DIY Bebas dari Korupsi".....36
Gambar 3. 5 Pamflet Dialog Jogja Pagi Ini 37
Gambar 3. 6 "Peran Perempuan Dalam Melawan Korupsi" pada Youtube Humas Jogja.....38
Gambar 3. 7 Video Budaya Anti Gratifikasi pada Channel Youtube Sekretariat Inspektorat DIY.....38
Gambar 3. 8 Podcast MAN 1 Yogyakarta di Platform Spotify.....39
Gambar 3. 9 Talkshow Star Jogja FM pada 21 Mei 2021.....40
Gambar 3. 10 Pemberitaan Harian Jogja 40
Gambar 3. 11 Buku Pendidikan Karakter Anti Korupsi disusun oleh Dr. Suyadi, M.Pd.I. · Suyitno, S.Pd., M.Pd. 41
Gambar 3. 12 Pamflet Soft Launching Buku "Antologi Puisi Menyuluh Anti Korupsi dengan Puisi" 42
Gambar 3. 13 Workshop Balai Dikmen pada 19 September 2023 43
Gambar 3. 14 Penguatan dan Konsolidasi Pendidikan Anti Korupsi PAKSIJI.....44
Gambar 3. 15 Pamflet Seminar Nasional Pendidikan Anti Korupsi 44
Gambar 3. 16 Seminar Anti Korupsi di UAD pada 11 Desember 2023.....45
Gambar 3. 17 Pelaksanaan Penyuluhan di BBVet Wates pada 22 Desember 2023 ..46
Gambar 3. 18 Kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi pada Selasa, 5 September 2023 46
Gambar 3. 19 Kegiatan Penyuluhan di SD Muhammadiyah Domban 2 dan SDN 1 Petir.....47
Gambar 3. 20 Kegiatan Penyuluhan pada Pelajar SMA/SMK 49
Gambar 3. 21 Kegiatan Bekerjasama dengan STMM MMTC Yogyakarta.....49
Gambar 3. 22 Banner Anti Gratifikasi di Inspektorat DIY 50
Gambar 3. 23 Kegiatan Inspektorat DIY pada Sosialisasi dan Koordinasi MCP tanggal 23-26 Maret 2021 51
Gambar 3. 24 Kegiatan Fasyankes di RSUD Sleman 51
Gambar 3. 25 Kegiatan Fasyankes di RSUD Sleman 52
Gambar 3. 26 website lapor.jogjaprov.go.id 52

ABSTRAK

Agvina, Fadila. 20321234 (2024). Strategi Komunikasi Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Upaya Pemberantasan Korupsi (Studi pada Program Penyuluh Anti Korupsi dan Monitoring Center For Prevention). (Skripsi Sarjana). Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia

Program sertifikasi Penyuluh Anti Korupsi (PAK) dan sistem *Monitoring Center for Prevention* (MCP) merupakan salah satu program yang dibentuk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya pemberantasan korupsi di pemerintahan daerah. KPK bekerja sama dengan Inspektorat Daerah pada masing-masing Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia. Inspektorat memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan pada kegiatan pemerintahan di wilayah provinsi dan melakukan pembinaan pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam menjalankan ketugasannya, Inspektorat bertanggung jawab secara langsung kepada Gubernur. Dalam hal ini Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi koordinator pada program PAK dan menjadi instansi yang bertanggung jawab untuk menjalankan program MCP di lingkungan DIY.

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui perencanaan dan strategi komunikasi yang dilakukan Inspektorat DIY dalam memberantas korupsi melalui program Penyuluh Anti Korupsi (PAK) dan Monitoring Center for Prevention (MCP), serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana hasil penelitian kualitatif disajikan dalam bentuk kata-kata berdasarkan data yang telah didapatkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu perencanaan komunikasi yang dibuat Inspektorat DIY antara lain berisi tentang penetapan target sasaran, kata kunci pesan, pemilihan komunikator, menentukan jenis media, penetapan waktu kegiatan, dan evaluasi program. Strategi komunikasi yang dilakukan yaitu dengan dengan pemanfaatan beragam media seperti, media cetak meliputi banner dan buku, media lagu, media radio, media sosial, dan media luar jaringan. Faktor pendukungnya adalah adanya hubungan baik yang terjalin antara Inspektorat DIY dengan instansi di wilayah Provinsi DIY, serta komunikator yang telah bersertifikat menunjukan kredibilitas dalam menyampaikan pesan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah pada media Instagram konten yang disajikan terlihat terlalu sederhana dan menjadi kurang menarik.

Saran penelitian bagi Inspektorat DIY yaitu perlu untuk memaksimalkan konten pada media sosial Instagram agar dibuat lebih menarik, sehingga berbagai kalangan masyarakat dapat menikmati dan lebih memahami isi pesan yang disampaikan.

Kata Kunci: Perencanaan Komunikasi, Strategi Komunikasi, Pemberantasan Korupsi, Inspektorat DIY

ABSTRACT

Agvina, Fadila. 20321234 (2024). Communication Strategy Inspektorat DIY in Effort to Eradicate Corruption (Study on the Anti-Corruption Counselor Program and Monitoring Center For Prevention) Communication Science Program, Faculty of Psychology and Socio-Cultural Sciences, Universitas Islam Indonesia.

The Anti-Corruption Advocacy Program (PAK) certification program and the Monitoring Center for Prevention (MCP) system are initiatives established by the Corruption Eradication Commission (KPK) in efforts to combat corruption in regional government. The KPK collaborates with the Regional Inspectorates of each local government across Indonesia. The Inspectorate has the duty and function of overseeing government activities in the provincial area and providing guidance to the district/city local governments. In carrying out its duties, the Inspectorate is directly accountable to the Governor. In this context, the Special Region of Yogyakarta (DIY) Inspectorate acts as the coordinator for the PAK program and is responsible for implementing the MCP program within DIY.

The purpose of this research is to understand the communication planning and strategies employed by the DIY Inspectorate in eradicating corruption through the Anti-Corruption Advocacy Program (PAK) and the Monitoring Center for Prevention (MCP), as well as to identify supporting and inhibiting factors. This study uses qualitative research methods, where the qualitative findings are presented in words based on data obtained through interviews, observations, and documentation.

The findings indicate that the communication planning developed by the DIY Inspectorate includes setting target objectives, key message words, selecting communicators, determining types of media, scheduling activities, and program evaluation. The communication strategies employed involve utilizing various media, such as printed materials including banners and books, music media, radio, social media, and offline media. Supporting factors include the good relationships established between the DIY Inspectorate and agencies within the DIY Province, as well as certified communicators demonstrating credibility in delivering messages. Conversely, inhibiting factors include the content presented on Instagram, which appears too simple and less engaging.

Recommendations for the DIY Inspectorate include maximizing content on social media platforms like Instagram to make it more appealing, allowing various segments of the community to enjoy and better understand the messages conveyed.

Keywords: Communication Planning, Communication Strategy, Eradication of Corruption, Inspektorat DIY

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia merupakan negara dengan angka korupsi yang tinggi. Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2021 adalah 38 dan berada di posisi 96 dari 180 negara di dunia. Namun pada tahun 2022 skor IPK yang didapatkan Indonesia mengalami penurunan empat poin yakni menjadi 34 dan menempatkan Indonesia berada di peringkat 110 dari 180 negara (Hantoro, 2023). Masih banyak kasus korupsi yang terjadi di Indonesia baik di tingkat pemerintahan pusat maupun daerah, membuat pemerintah perlu segera melakukan upaya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Faktor penyebab masih tingginya angka korupsi disebabkan karena kurangnya integritas yang dimiliki setiap individu dan adanya celah pada sistem administrasi pemerintahan yang tidak transparan serta politik berbiaya tinggi (Goodstats, 2022). Upaya yang dijalankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menegakkan pemberantasan korupsi, yaitu dengan dijalankannya trisula pemberantasan korupsi, yakni penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Ketiga trisula tersebut perlu dilakukan secara simultan dan terintegrasi dengan berkolaborasi salah satunya dengan pemerintah daerah (KPK, 2022). Adapun bentuk program yang dilakukan KPK adalah membuat program sertifikasi Penyuluh Anti Korupsi (PAK) dan sistem *Monitoring Center for Prevention* (MCP).

Program sertifikasi PAK merupakan program pengembangan kompetensi yang ditujukan untuk para penggerak anti korupsi dalam melakukan penyuluhan anti korupsi. Sertifikasi dilakukan secara sistematis dan obyektif dengan uji kompetensi berdasarkan standar profesi nasional dan/atau internasional. Adanya program PAK dilatarbelakangi oleh upaya KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi melalui sula pendidikan. Namun keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang dimiliki KPK tidak memadai dan proses edukasi kepada masyarakat menjadi terhambat (aclckpk, 2022).

Program MCP merupakan program yang digagas oleh KPK guna melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Program MCP berfokus pada tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Dengan adanya program MCP diharapkan dapat memberikan dorongan bagi instansi daerah supaya mentransformasi nilai dan praktik tata kelola pemerintahan yang baik (Merdeka, 2022). Terdapat delapan area intervensi pada program MCP, yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), penguatan kapasitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP),

manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola dana desa (Firmansyah, 2022).

Dalam rangka merealisasikan program-program tersebut, KPK bekerja sama dengan Inspektorat Daerah pada masing-masing Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) memiliki tugas utama yaitu untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh perangkat daerah di wilayah pemerintahan daerah yang meliputi dinas, badan, serta lembaga daerah lainnya. Inspektorat bertugas untuk memastikan bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan ketugasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Dalam hal ini Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi koordinator pada program PAK dan menjadi instansi yang bertanggung jawab untuk menjalankan program MCP di lingkungan DIY. Pada program PAK Inspektorat DIY memfasilitasi para penyuluh anti korupsi di wilayah Provinsi DIY baik dari sisi anggaran maupun sarana prasarana. Sedangkan pada program MCP, Inspektorat DIY bertugas untuk melakukan koordinasi langsung dan mendorong semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/ instansi di lingkungan Pemerintah DIY dalam pemenuhan indikator parameter yang telah ditetapkan dalam sistem MCP KPK. Berdasarkan surat KPK nomor B/1215/KSP.00/70-74/03/2023 tentang Capaian MCP Tahun 2022, Inspektorat DIY pada tahun 2022 menempati peringkat pertama di wilayah DIY.

Dalam menjalankan hal tersebut Inspektorat DIY memerlukan strategi komunikasi sebagai pondasi awal supaya dalam menjalankan program tersebut dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan. Menurut Effendy (Suryadi, 2018:5) strategi komunikasi merupakan penyatuan dari rencana (*planning*) dan manajemen (*management*), selain itu strategi komunikasi menjadi langkah awal dari perencanaan komunikasi dan manajemen dalam komunikasi. Oleh sebab itu, perencanaan hingga pelaksanaan yang telah dilakukan Inspektorat DIY tidak terlepas dari perencanaan dan strategi komunikasi.

Terdapat beberapa kajian penelitian yang telah dilakukan mengenai permasalahan korupsi seperti, penelitian yang membahas mengenai strategi Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang melakukan sosialisasi larangan melakukan korupsi Gunawan (2010). Selain itu, terdapat penelitian tentang strategi komunikasi yang dilakukan direktorat gratifikasi KPK dalam melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi Sulistiyaningsih (2019). Berbeda dengan penelitian tentang bagaimana negara Ukraina membangun budaya anti korupsi yang dimulai dari diri hingga institusi melalui komunikasi antara pemerintah dan publik Soldatenko (2022). Kajian penelitian terdahulu tersebut membahas mengenai

permasalahan korupsi, namun masih jarang ditemukan penelitian yang meneliti tentang pelaksanaan program KPK di wilayah pemerintahan daerah.

B. Rumusan Masalah:

Rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perencanaan dan strategi komunikasi yang dilakukan Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memberantas korupsi melalui program Penyuluh Anti Korupsi (PAK) dan *Monitoring Center for Prevention* (MCP)?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dialami Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menjalankan program Penyuluh Anti Korupsi (PAK) dan *Monitoring Center for Prevention* (MCP)?

C. Tujuan Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui perencanaan dan strategi komunikasi yang dilakukan Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memberantas korupsi melalui program Penyuluh Anti Korupsi (PAK) dan *Monitoring Center for Prevention* (MCP).
2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dialami Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menjalankan program Penyuluh Anti Korupsi (PAK) dan *Monitoring Center for Prevention* (MCP).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Dapat menjadi sebuah bahan acuan bagi penelitian yang memiliki unsur kesamaan dan dapat menjadi bukti empiris ilmu pengetahuan mengenai Strategi Komunikasi pada Program Penyuluh Anti Korupsi (PAK) dan Monitoring Center for Prevention (MCP) Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi oleh Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Diharapkan dapat dijadikan untuk bahan penambah wawasan dan meningkatkan wawasan di bidang ilmu komunikasi, khususnya pada bidang yang berkaitan dengan korupsi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pihak Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan evaluasi dan menjadi bahan acuan untuk pelaksanaan program Penyuluh Anti

Korupsi (PAK) dan Monitoring Center for Prevention (MCP) yang akan mendatang.

b. Diharapkan dapat menambah informasi kepada pembaca terkait dengan strategi yang dilakukan Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta pada program Penyuluh Anti Korupsi (PAK) dan Monitoring Center for Prevention (MCP).

E. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Terdapat lima penelitian terdahulu yang menjadi acuan pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

a. Penelitian pertama dilakukan oleh Gunawan (2010) “Strategi Komunikasi Majelis Ulama Indonesia dalam Mensosialisasikan Fatwa Haram Korupsi Kepada Umat Islam Indonesia“. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan pada penelitian ini mengungkapkan strategi MUI yang melakukan sosialisasi larangan melakukan korupsi. MUI menelaah dan menjabarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.Terdapat tiga fase yang dilakukan MUI dalam mencapai target yang diinginkan, yaitu merumuskan strategi yang akan digunakan, implementasi strategi, dan evaluasi terhadap strategi yang telah digunakan.

   Penelitian ini memiliki persamaan pada metode yang digunakan dan persamaan pada konsep yang diteliti, yaitu strategi komunikasi dalam upaya pemberantasan korupsi. Namun perbedaanya terletak pada fokus program yang dilaksanakan oleh Inspektorat DIY yaitu program PAK dan MCP.

b. Penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan Orina (2014), berjudul “A Study Of Anti-Corruption Communication Planning By State Anti-Corruption Agencies In Kenya: A Case Study Of The Ethics And Anti-Corruption Commission”. Penelitian ini membahas tentang strategi komunikasi anti korupsi yang dilakukan lembaga korupsi di Kenya yaitu Anti-Corruption Agencies (ACAs). Di dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa korupsi tidak hanya menjadi permasalahan hukum saja, namun juga permasalahan dalam hal budaya. Hukum tidak dapat secara langsung mengubah perilaku manusia, jika tidak menjadi bagian dari budaya suatu negara. Terdapat hal yang menjadi perhatian ACAs dalam melakukan perencanaan strategi komunikasi anti korupsi yaitu, target audiens, media saluran yang digunakan, dan pesan yang akan disampaikan.

Kesamaan penelitian ini terdapat pada konsep permasalahannya yang dibahas, yaitu tentang strategi komunikasi dalam pemberantasan korupsi. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitiannya.

c. Penelitian ketiga berjudul “Strategi Komunikasi Direktorat Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Mensosialisasikan Pengendalian Gratifikasi“. Diteliti oleh Sulistiyaningsih pada tahun 2019, penelitian ini membahas tentang strategi komunikasi yang dilakukan direktorat gratifikasi KPK dalam melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi melalui empat tahapan. Mengacu pada teori Cutlip dan Center bahwa strategi komunikasi dapat dilakukan melalui tahapan yakni penelitian, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

   Persamaan yang ada pada penelitian ini terletak pada kesamaan konsep penelitian yaitu mengenai strategi komunikasi yang digunakan suatu institusi pemerintah dalam melaksanakan program KPK. Sedangkan perbedaannya ialah fokus program KPK yang dijalankan.

d. Penelitian selanjutnya berjudul “Efektifitas Strategi Komunikasi Pendidikan Dan Budaya Anti Korupsi Pada Direktorat Operasi Sumber Daya, Ditjen SDPPI, Kementerian Kominfo“. Diteliti oleh Luthfitasari dan Nugrahani pada tahun 2017, penelitian ini menyelidiki tingkat efektivitas budaya anti korupsi melalui strategi komunikasi pendidikan yang dilakukan oleh Direktorat Operasi Sumber Daya dengan menggunakan metode kuantitatif dan penyebaran kuesioner yang didukung oleh kajian pustaka serta observasi (Pace, dkk., 1979). Prinsip yang digunakan dalam penelitian tersebut ialah prinsip strategi komunikasi yang berupa merumuskan tujuan, menetapkan target sasaran, mendesain pesan, menetapkan metoda dan menetapkan media

   Persamaan yang ada pada penelitian ini terletak pada kesamaan konsep penelitian yaitu mengenai strategi komunikasi yang digunakan suatu institusi pemerintah dalam menjalankan dan menyukseskan program KPK. Sedangkan perbedaannya ialah metode penelitian dan fokus program KPK yang dijalankan.

e. Penelitian kelima dilakukan oleh Soldatenko (2022) dengan judul “*Communication Between The Government And The Public As A Factor In Lowering The Risk Of Corruption*“. Penelitian ini membahas tentang bagaimana negara Ukraina membangun budaya anti korupsi yang dimulai dari diri hingga institusi melalui komunikasi antara pemerintah dan publik dengan penerapan program metode “*The Islands of Integrity Anti-Corruption*“. Cara yang dilakukan pemerintah Ukraina yaitu dengan membentuk kelompok kerja

yang melibatkan pemerintah daerah, di bawah bimbingan seorang fasilitator, melakukan sejumlah langkah untuk menentukan penyebab terjadinya korupsi dan mencari solusi untuk meminimalkannya.

Kesamaan penelitian ini ada pada konsep permasalahannya yang dibahas, yaitu tentang permasalahan korupsi. Namun, perbedaannya terletak pada objek dan program kegiatan dalam pemberantasan korupsi.

f. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Sheryazdanova & Butterfield (2017) dengan judul "*E-government as an Anti-Corruption Strategy in Kazakhstan*". Penelitian ini membahas tentang pengembangan program e-government dalam pemberantasan korupsi di Kazakhstan. Pengembangan yang dilakukan pemerintah Kazakhstan yaitu dengan penerapan pelayanan secara online pada beberapa layanan, penyederhanaan layanan terhadap publik, dan batasan waktu penyelesaian pelayanan kepada publik. Persamaan dalam penelitian ini ialah pembahasan program pemberantasan korupsi dan perbedaannya terletak pada objek serta bidang kajiannya.

Berdasarkan paparan di atas, penelitian yang membahas terkait dengan korupsi telah banyak dilakukan, namun belum banyak ditemukan penelitian yang membahas mengenai pelaksanaan program KPK dalam pemberantasan korupsi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Sehingga pada penelitian ini peneliti menyajikan kebaruan penelitian dengan membahas mengenai strategi komunikasi yang dilakukan Inspektorat DIY dalam upaya pemberantasan korupsi melalui program PAK dan MCP.

2. Kerangka Konsep

a. Perencanaan komunikasi

Perencanaan biasanya dilakukan pada awal kegiatan organisasi sehingga bagian ini mempunyai kedudukan sangat penting dalam proses manajemen organisasi (Widjajanto, 2013). Tiga karakteristik perencanaan, yaitu:

1) Berhubungan dengan masa yang akan datang,
2) Serangkaian tindakan yang diambil oleh perencana di masa yang akan datang,
3) Pengidentifikasian individu atau pribadi dan organisasi juga menjadi salah satu unsur utama perencanaan di masa yang akan datang.

Dalam buku Cangara yang berjudul “Perencanaan dan Strategi Komunikasi“ terdapat lima syarat perencanaan yang baik, yaitu sebagai berikut:

1) Faktual dan realistis

   Suatu perencanaan harus dibuat berdasarkan fakta serta dapat diimplementasikan.

2) Logis dan rasional

   Perencanaan yang disusun harus sesuai logika dan dapat dicapai.

3) Fleksibel

   Penyusunan perencanaan harus memperhitungan kemungkinan yang dapat terjadi dan menghambat pelaksanaanya.

4) Komitmen

   Semua pihak yang terlibat dalam perencanaan harus bekerja dengan penuh tanggung jawab sesuai rencana yang disusun.

5) Komprehensif atau menyeluruh

   Perencanaan harus disusun dengan mempertimbangkan bidang-bidang terkait lainnya sehingga dalam proses pelaksanaannya dapat berjalan secara sinergis dan dinamis.

Dalam proses perencanaan diperlukan suatu komunikasi yang efektif. Definisi perencanaan menurut Cangara (2013: 22) adalah proses yang dilakukan untuk menentukan serangkaian tindakan yang diambil secara tepat. Sedangkan definisi komunikasi menurut Cangara (2013: 33) merupakan proses pemindahan (transfer) informasi dari seseorang kepada orang lain, atau sebaliknya. Keberhasilan atau kegagalan seseorang dalam mencapai sesuatu dapat dipengaruhi dari kemampuan komunikasi yang disampaikan. Dalam proses komunikasi akan ditemukan berbagai rintangan atau hambatan, sehingga untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan suatu perencanaan komunikasi.

Perencanaan komunikasi adalah dokumen tertulis dimana harus dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut Cangara (2013: 46):

1) Capaian apa yang diinginkan
2) Apa yang menjadi latar belakang
3) Target sasaran yang ditetapkan
4) Kata kunci pesan apa yang digunakan
5) Pemilihan komunikator dan bagaimana cara menentukannya
6) Cara yang digunakan dalam mencapai tujuan

7) Jenis media apa untuk menyampaikan pesan
8) Waktu untuk menyampaikan pesan
9) Bagaimana evaluasi yang dilakukan dari program yang dijalankan

b. Media Komunikasi

Model komunikasi Lasswell (dalam Sanityastuti, 2020) menjelaskan komunikasi sebagai proses yang melibatkan beberapa elemen penting yaitu *Who* (siapa komunikatornya), *Says What?* (pesan apa yang dinyatakan), *In which channel?* (media apa yang digunakannya), *To whom?* (siapa komunikannya), dan *With what effect?* (efek apa yang diharapkan) atau dalam arti lain yaitu siapa yang mengatakan apa, melalui saluran apa, kepada siapa, dan dengan efek apa. Dalam hal ini, saluran atau media adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan memiliki peran penting dalam proses komunikasi.

Media komunikasi dapat mempermudah dan mempercepat penyampaian informasi kepada khalayak. Media juga dapat diartikan sebagai perantara dari komunikator kepada komunikan. Menurut Cangara (dalam Sulistiyaningsih, 2019) berdasarkan jenisnya media komunikasi dapat dibedakan, yaitu sebagai berikut:

1) Media Cetak

   Media cetak merupakan alat komunikasi secara tertulis atau dalam bentuk gambar. Media cetak dapat berbentuk surat kabar, tabloid, buku, majalah, dan lain sebagainya.

2) Media Elektronik

   Media elektronik merupakan alat komunikasi yang ditransmisikan melalui getaran listrik yang diterima oleh pesawat penerima tertentu yang umumnya bersifat audio, atau audio visual. Media elektronik bentuknya seperti, televisi dan radio.

3) Media Luar Ruangan

   Media luar ruangan berkaitan dengan bentuk media seperti banner, spanduk, dan baliho.

4) Media Internet

   Media internet atau *New Media* merupakan media yang menggunakan jaringan telekomunikasi. Contohnya seperti website, dan media sosial meliputi Facebook, Twitter, Whatsapp, dan Instagram.

c. Strategi Komunikasi

Menurut Onong Uchjana Effendy dalam buku “Ilmu Komunikasi; Teori dan Praktek” strategi adalah suatu cara dalam mencapai tujuan yang diinginkan dengan menggunakan perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) yang terstruktur. Sedangkan strategi komunikasi adalah pedoman yang berfungsi untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini berarti strategi komunikasi memberitahukan terkait kiat dan cara suatu kegiatan dilakukan secara praktis dengan pendekatan yang tidak sama satu dan lainnya atau tergantung pada keadaan situasi dan kondisi (2009: 32).

Setiap peristiwa komunikasi yang terencana memiliki target capaian tertentu, yaitu memberikan pengaruh terhadap publik atau komunikan Cangara (2007:165). Pengaruh dapat terlihat dari adanya perubahan *knowledge*, *attitude*, dan *behavior*. Perkembangan ilmu pengetahuan mempengaruhi cara pandang dari komunikan atau publik.

Menurut Liliweri (2011: 248) dalam buku “Komunikasi Serba Ada Serba Makna” menjelaskan dalam strategi komunikasi dapat bertujuan untuk *announcing*, *motivating*, *educating*, i*nforming*, dan *supporting decision making*. R. Wayne Pace, Brent D. Peterson, dan M. Dallas Burnett melalui bukunya yang berjudul, “*Techniques for Effective Communication*“, dalam Effendy (2009: 32) menjelaskan dalam strategi komunikasi, adapun tujuan utama yang menjadi inti aktivitas komunikasi:

1) *To secure understanding*, komunikator diharuskan untuk dapat meyakinkan terhadap pesan yang telah tersampaikan sudah dapat dipahami oleh komunikan
2) *To establish acceptance*, komunikator memberikan pendampingan atau pembinaannya terhadap komunikan
3) *To motivate action*, pada akhirnya komunikan termotivasi.

d. Strategi Komunikasi Dalam Pemberantasan Korupsi

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia menerbitkan buku yang berjudul “Cetak Biru Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi“. Buku Cetak Biru Strategi Komunikasi PBAK dapat dijadikan sebagai panduan dan pedoman dalam menyampaikan pesan PBAK. Dalam proses penyampaian pesan PBAK diperlukan strategi komunikasi yang efektif dan efisien, karena tanpa strategi komunikasi, menyebabkan tidak ada

perencanaan yang baik saat memilih kelompok sasaran, pesan, sumber, media dan efek yang dihasilkan Subarjono *et al* (2012: 5).

Berikut program strategi komunikasi yang dapat dilakukan:

1) Meningkatkan penggunaan media massa sebagai sarana komunikasi dan media PBAK

   Bentuk program yang dapat dilakukan yaitu:

   a) Membuat iklan atau cerita ringkas tentang PBAK di televisi, radio, media cetak, atau media online.
   b) Bekerja sama dengan TVRI, RRI, dan media massa lainnya untuk menyiarkan iklan layanan publik yang berisi pesan-pesan anti korupsi.
   c) Mendorong kementerian dan lembaga untuk menyebarluaskan praktik PBAK kepada masyarakat luas melalui media massa.
   d) Mendorong sektor swasta, masyarakat, dan komunitas anti korupsi untuk melakukan sosialisasi PBAK melalui media massa secara berkesinambungan.

2) Memfasilitasi kegiatan komunikasi komunitas antikorupsi di lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat luas

   a) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan PBAK baik di lingkungan lembaga pemerintahan, swasta, dan masyarakat
   b) Penyelenggaraan kampanye anti korupsi
   c) Penyebarluasan informasi mengenai aktivitas dan program komunitas anti korupsi

3) Mendorong pembentukan dan pengembangan wahana dan komunitas antikorupsi

   a) Dapat dilakukan dalam bentuk seminar, workshop, atau program pelatihan PBAK yang ditujukan untuk guru pendidik, mahasiswa, siswa dan otoritas pendidikan, lembaga swasta, dan lembaga negara
   b) Melakukan penilaian terhadap lembaga publik, swasta dan masyarakat terkait PBAK
   c) Mengoptimalisasi pengawasan, pembinaan sumber daya manusia yang anti korupsi dan penetapan terhadap wilayah bebas dari korupsi berdasarkan capaian unit kerja
   d) Memfasilitasi tukar pengalaman terbaik antar komunitas anti korupsi

4) Mengoptimalkan kualitas dan kuantitas partisipasi dengan sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga pendidik

a) Mengkampanyekan tentang adopsi mata pelajaran PBAK di sekolah maupun universitas
b) Meningkatkan pengembangan dan sosialisasi nilai-nilai antikorupsi dalam bentuk cerita mengenai pengalaman pribadi atau komunitas melalui diskusi di ruang publik
c) Kegiatan PBAK didukung untuk dilaksanakan di ruang publik dalam bentuk workshop, kompetisi, atau program kepelatihan yang terencana dan terarah untuk sektor swasta, kelompok masyarakat khususnya pelajar, dan mahasiswa serta jurnalis
d) Mendorong lembaga pemerintah dan swasta untuk melakukan pemanfaatan teknologi informasi dalam mensosialisasikan PBAK di ruang publik
e) Mendokumentasikan dan melakukan komunikasi melalui media sosial terkait hasil-hasil penyelenggaraan pendidikan formal dan nonformal mengenai PBAK

5) Pengembangan kerjasama jaringan kelembagaan komunikasi untuk mendorong efektivitas PBAK di lembaga negara serta di sektor swasta
a) Meningkatan kerjasama komunikasi PBAK dapat dengan melakukan penandatanganan MoU bersama lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan, ataupun lembaga swasta
b) Mendorong penulisan dan penerbitan buku untuk para penggiat yang memiliki perhatian dan keahlian di bidang PBAK
c) Mengadakan lomba atau kontes penyusunan materi pesan komunikasi PBAK dapat dalam bentuk kartun, poster, karikatur, dan sejenisnya
d) Mendorong penyelenggaraan event yang berkaitan dengan PBAK dan melibatkan seluruh elemen masyarakat

6) Mengoptimalkan kesadaran akan kejujuran diri terhadap nilai-nilai anti korupsi
a) Mendorong kesadaran ASN maupun masyarakat untuk berani menolak dan melaporkan segala bentuk tindakan korupsi
b) Mendorong setiap lembaga untuk mengembangkan diskusi antar lembaga tentang praktik dan nilai-nilai anti korupsi
c) Masing-masing lembaga mengadakan atau ikut serta dalam perlombaan tentang aktivitas PBAK seperti penulisan artikel, program radio, film pendek, atau iklan televisi

d) Mendorong seluruh komunitas PBAK untuk mempublikasikan hasil diskusi dan kajian yang telah dilakukan melalui media massa

7) Meningkatkan kesadaran masyarakat maupun komunitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui whistleblower dan justice collaborator
   a) Menyebarluaskan informasi tentang perang penting dan manfaat dari menjadi *whistleblower* dan *justice collaborator*
   b) Mendorong penyebarluasan informasi secara berkala mengenai aktivitas pelaporan kekayaan harta pejabat publik
   c) Mendorong kementerian dan lembaga untuk memberikan kepastian informasi penjaminan keamanan identitas bagi *whistleblower* dan *justice collaborator*
   d) Mendorong komunitas dan masyarakat untuk memberikan dukungan moral bagi tokoh *whistleblower* dan *justice collaborator*

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana secara harfiah memiliki definisi sebagai metode penelitian yang dilakukan secara luas atau menyeluruh terhadap subjek penelitian. Pada penelitian kualitatif, peneliti menjadi alat atau instrumen utama. Hasil penelitian kualitatif disajikan dalam bentuk kata-kata berdasarkan data yang telah didapatkan melalui informasi yang valid. Penggunaan metode kualitatif pada penelitian ini bertujuan untuk memberikan deskripsi keseluruhan mengenai strategi komunikasi Inspektorat DIY dalam menjalankan program PAK dan MCP Jaya (2021: 110).

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2023 hingga Januari 2024. Lokasi penelitian dilaksanakan di Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Jalan Cendana Nomor 40, Yogyakarta.

3. Narasumber Penelitian

Narasumber pada penelitian ini adalah pihak internal Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta yang terlibat pada program PAK dan MCP. Pemilihan narasumber berdasarkan kapabilitas dan peran yang dijalani oleh narasumber pada program PAK dan MCP. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah Kepala Bidang Sub Bagian Program dan Monitoring Evaluasi Inspektorat

DIY, Inspektur Pembantu Bidang Sarana Prasarana Inspektorat DIY, dan Sekretaris Inspektorat DIY.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini menggunakan teknik yang telah diselaraskan dengan jenis metode penelitian, yaitu metode penelitian kualitatif. Sehingga data dikumpulkan dengan cara, sebagai berikut:

a. Wawancara

Definisi wawancara yaitu kegiatan komunikasi langsung yang dilakukan dengan suatu tujuan, antara satu pihak dengan pihak lain yakni *pewawancara* menjadi pihak yang memberikan pertanyaan dan *terwawancara* atau responden menjadi pihak yang menjawab Moleong (2017:186). Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2013: 233), terdapat beberapa jenis dalam wawancara yaitu terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur.

Peneliti melakukan wawancara semistruktur. Hal tersebut dilakukan karena peneliti dapat lebih leluasa dalam mengajukan pertanyaan jika dibandingkan dengan wawancara terstruktur.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menganalisis serta mencatat hasil temuan yang didapatkan dari objek penelitian Jaya (2021: 150). Sanafiah dalam Sugiyono (2013: 226), membagi tiga jenis observasi, yaitu partisipatif, terus terang dan tersamar, serta observasi tak terstruktur. Dalam penelitian ini peneliti menjadi partisipan pasif yang datang secara langsung ke tempat kegiatan, namun tidak ikutserta dalam aktivitas yang dilaksanakan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah aktivitas mengumpulkan data dalam bentuk foto, video, hasil wawancara, serta dokumen lainnya yang dibutuhkan peneliti untuk mendukung hasil penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013: 246), menyatakan bahwasannya dengan melakukan analisis data kualitatif terjadi secara interaktif dan sampai akhir atau selesai.

Dalam penelitian ini analisis data yang dilakukan, yaitu:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Peneliti akan memfokuskan pada data penting yang telah diperoleh di lapangan, dan meringkas data, serta membuat kategorisasi menyesuaikan dengan keperluan penelitian.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan data secara deskriptif, bagan, atau hubungan antar kategori.

c. Penarikan Kesimpulan (*Verification*)

Kesimpulan dapat dikatakan kredibel apabila, terdapat bukti yang valid dan konsisten terhadap data yang ditemukan.

BAB II
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta

Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada awalnya, bernama Inspektorat Wilayah II DIY dan sempat berganti menjadi Badan Pengawas Daerah (Bawasda). Kemudian terbit Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, salah satunya yaitu pembentukan Inspektorat DIY. Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor. 91 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Sususan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat, Inspektorat memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan pada kegiatan pemerintahan di wilayah provinsi dan melakukan pembinaan pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam menjalankan ketugasannya, Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang telah ditetapkan oleh Gubernur. Selain itu, dalam menjalankan ketugasannya Inspektorat bertanggungjawab secara langsung kepada Gubernur. Inspektorat DIY beralamat di Jalan Cendana No.40, Semaki, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, kode pos 55166. (http://inspektorat.jogjaprov.go.id/, akses tanggal 17 September 2023)

Inspektorat DIY selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) memiliki tugas utama yaitu untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh perangkat daerah di wilayah pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi dinas, badan, serta lembaga daerah lainnya. Inspektorat DIY bertugas untuk memastikan bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan ketugasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Inspektorat berwenang untuk melakukan pengawasan yaitu meliputi pemeriksaan, evaluasi, hingga audit terhadap kinerja seluruh perangkat daerah di wilayah kerja Inspektorat DIY. Salah satu tujuan dari adanya pengawasan yaitu untuk mendorong pemerintah daerah supaya dapat mentransformasi nilai dan praktik tata kelola pemerintahan yang baik, serta mengupayakan pemerintah daerah di wilayah provinsi DIY dapat terhindar dari adanya kasus tindak pidana korupsi.

B. Visi Misi

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY tahun 2022-2027, Gubernur DIY menetapkan visi DIY yaitu “Mewujudkan Pancamulia Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan,serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi“.

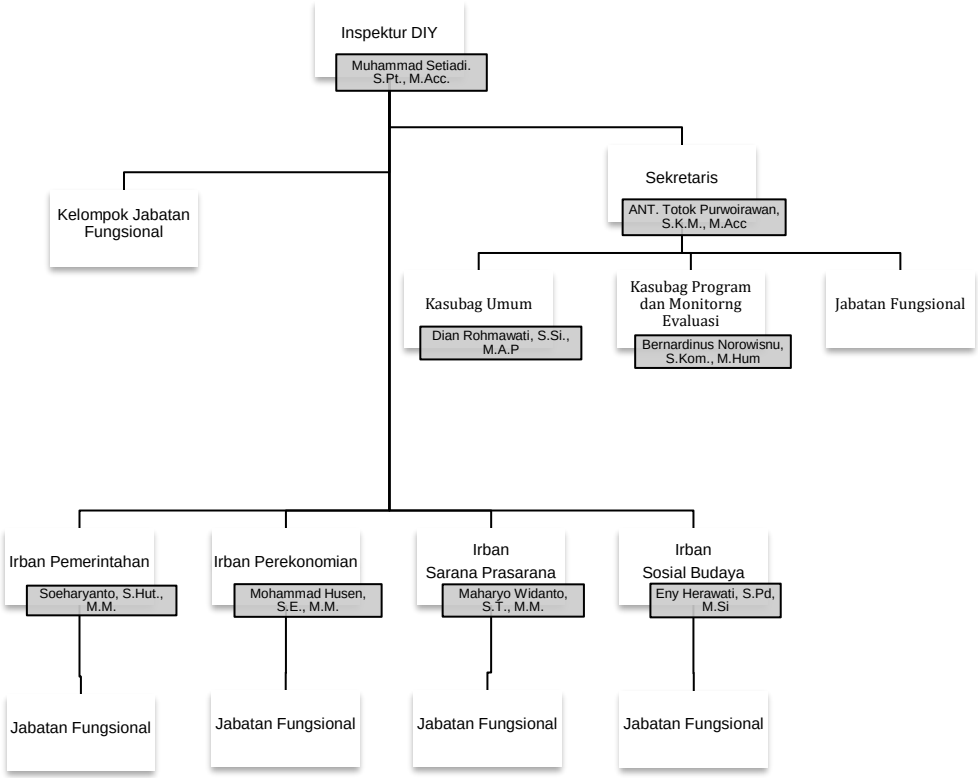
Setiap Instansi/OPD di lingkungan pemerintah DIY mendukung Visi Kepala Daerah tersebut.

Sedangkan misi Gubernur DIY digambarkan dari Kemuliaan martabat manusia Jogja yang menyandang Misi "Pancamulia" atau "Lima Kemuliaan", yaitu:

1. Terwujudnya peningkatan kualitas hidup - kehidupan - penghidupan masyarakat yang berkeadilan serta berkeadaban, dengan peningkatan kemampuan dan peningkatan ketrampilan SDM Jogja yang dapat berdaya saing,
2. Terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan ekonomi masyarakat dan penguatan ekonomi yang berbasis pada sumberdaya lokal (keunikan teritori ekonomi) untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan perekonomian yang berkeadilan,
3. Terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, serta kebersamaan,
4. Terwujudnya tata dan perilaku pada penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis,
5. Terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan suatu hal penyimpangan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dalam mewujudkan visi pembangunan DIY, Inspektorat DIY berupaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang demokratis, bermartabat, serta dapat menanamkan nilai-nilai integritas yang perlu dimiliki setiap pegawai pemerintahan khususnya di willayah pemerintahan provinsi DIY. Dalam hal ini, Inspektorat DIY menjalankan fungsinya yaitu melakukan pengawasan terhadap dinas, badan, atau lembaga di lingkup pemerintahan provinsi DIY. Sehingga dengan terlaksananya program-program pemerintahan DIY, visi untuk “Mewujudkan Pancamulia Masyarakat Jogja“ dapat terwujud sesuai dengan yang diharapkan oleh Gubernur DIY.

C. Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta



Gambar 2. 1 Bagan Struktur Organisasi Inspektorat DIY
Sumber: https://inspektorat.jogjaprov.go.id/strusktur-organisasi/

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2022 pasal 3 dijabarkan bahwa susunan organisasi Inspektorat DIY terdiri dari Inspektur, Sekretariat, Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan, Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian, Inspektur Pembantu Bidang Sosial Budaya, Inspektur Pembantu Bidang Sarana dan Prasarana, Serta Kelompok Jabatan Fungsional.

D. Tugas dan Fungsi Inspektorat

Berdasarkan Perdais No 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Inspektorat mempunyai tugas pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Inspektorat bertugas secara langsung kepada Gubernur untuk membantu berjalannya tata kelola pemerintahan di daerah provinsi sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 91 Tahun

2022 Tentang Kedudukan, Sususan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat. Dalam menjalankan tugas, Inspektorat DIY memiliki fungsi yaitu sebagai berikut:

1. Menyusun program kerja Inspektorat
2. Merumuskan kebijakan serta memfasilitasi pengawasan
3. Melakukan pengawasan serta pembinaan pada pelaksanaan pemerintahan daerah
4. Mengawasi pelaksanaan pada agenda keistimewaan
5. Memeriksa, menyelidiki, menguji, dan melakukan penilaian tugas pengawasan
6. Pengoordinasian terkait dengan pencegahan korupsi
7. Mengawasi kegiatan pada program reformasi birokrasi
8. Memantau, mengevaluasi, dan melakukan pelaporan kegiatan pengawasan
9. Melakukan koordinasi, pembinaan, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaran pemerintahan di daerah Kabupaten/ Kota
10. Melakukan koordinasi, pembinaan, serta melakukan pengawasan pada pemerintahan di daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/ Kota pada bidang pengawasan
11. Menyelenggarakan agenda kesekretariatan
12. Fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Inspektorat
13. Fasilitasi penyusunan kebijakan pada proses bisnis Inspektorat
14. Melakukan pengembangan pada sistem TIK yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam lingkup Inspektorat
15. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Inspektorat
16. Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah Gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Inspektorat

Dalam menjalankan fungsi untuk melakukan koordinasi pencegahan korupsi, Inspektorat DIY membagi ketugasannya sebagai berikut:

1. Kepala Inspektorat

   Tugas: Melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan di daerah provinsi DIY sesuai dengan amanat Gubernur DIY.

2. Sekretariat

   Tugas: Menyelenggarakan kesekretariatan Inspektorat yang meliputi penyusunan program kerja, pengelolaan kepegawaian, keuangan, kehumasan, dan ketatalaksanaan Inspektorat.

3. Sub Bagian Program dan Monitoring Evaluasi

   Tugas: bertanggungjawab langsung kepada Sekretariat untuk melaksanakan tugas menyusun program, mengelola data dan sistem informasi, serta melakukan evaluasi pada program yang dilaksanakan. Selain itu Sub Bagian Program dan Monitoring Evaluasi memiliki fungsi untuk melaksanakan koordinasi terhadap pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan provinsi DIY.

Sub Bagian Program dan Monitoring Evaluasi menjadi *leading sector* pada kegiatan yang berkaitan dengan pengoordinasian pencegahan korupsi. Dalam hal ini PAK dan MCP merupakan bagian dari kegiatan pencegahan tindak pidana korupsi. Pelaksanaan kegiatan pencegahan korupsi dilakukan oleh personil di lingkungan Inspektorat DIY, meliputi pejabat struktural (Inspektur Pembantu/ Irban) maupun pejabat fungsional.

E. Program Penyuluh Anti Korupsi (PAK) dan *Monitoring Center For Prevention* (MCP)

Dalam rangka upaya pemberantasan korupsi, bentuk upaya yang dilakukan KPK adalah membuat program sertifikasi Penyuluh Anti Korupsi (PAK) dan sistem *Monitoring Center for Prevention* (MCP). Program tersebut bermanfaat sebagai instrumen pendukung dalam upaya pemberantasan korupsi. Dalam hal ini, Inspektorat DIY turut serta dalam penyelenggaraan program PAK maupun MCP di wilayah pemerintahan provinsi DIY.

1. **Program Penyuluh Anti Korupsi (PAK)**

   PAK merupakan program sertifikasi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif dengan uji kompetensi berdasarkan standar profesi nasional dan/atau internasional. Program sertifikasi tersebut ditujukan untuk mendorong partisipasi pemerintah daerah dalam melakukan penyuluhan anti korupsi. Sehingga nantinya para Penyuluh Antikorupsi dapat memiliki kompetensi dalam melakukan penyuluhan anti korupsi dan penyampaian pesan anti korupsi dapat dilaksanakan secara efektif. Para Penyuluh Antikorupsi di Yogyakarta, tergabung dalam satu forum yaitu Penyuluh Anti Korupsi Sahabat Integritas Jogja Istimewa (PAKSIJI). Sekertariat PAKSIJI

bertempat di Inspektorat DIY dan di dalam DPA Inspektorat DIY terdapat anggaran untuk mendukung kegiatan PAKSIJI.

2. **Monitoring Center For Prevention (MCP)**

   Program MCP merupakan program yang berfokus pada tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Dengan adanya program MCP diharapkan dapat memberikan dorongan bagi perangkat daerah supaya mentransformasi nilai dan praktik tata kelola pemerintahan yang baik. Terdapat delapan area intervensi pada program MCP, yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), penguatan kapasitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola dana desa. Inspektorat DIY selaku leading sektor dalam program MCP, bertugas untuk melakukan koordinasi terkait dengan hal-hal yang harus dilakukan pemerintah DIY sesuai dengan pedoman MCP yang diterbitkan oleh KPK.

BAB III
TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti menyajikan dan memberikan penjelasan berdasarkan dari hasil temuan penelitian yang telah didapatkan, berkaitan dengan topik penelitian yang berjudul “Strategi Komunikasi Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Upaya Pemberantasan Korupsi (Studi pada Program Penyuluh Anti Korupsi (PAK) dan Monitoring Center For Prevention (MCP))". Untuk mendapatkan hasil data yang akurat, temuan penelitian diperoleh berdasarkan hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi dari pihak Inspektorat DIY yang terlibat pada Program PAK dan MCP.

Berikut merupakan daftar nama narasumber dan jadwal wawancara yang telah peneliti lakukan kepada pihak Inspektorat DIY yang terlibat pada Program PAK dan MCP, yakni:

Tabel 3.1 Daftar Nama Narasumber

No	Hari/Tanggal	Narasumber	Jabatan
1.	Jumat, 8 Desember 2023	Bernardinus Norowisnu, S.Kom., M.Hum	Kepala Bidang Sub Bagian Program dan Monitoring Evaluasi Inspektorat DIY
2.	Selasa, 12 Desember 2023	Maharyo Widanto, S.T., M.M.	Inspektur Pembantu Bidang Sarana Prasarana Inspektorat DIY
3.	Selasa, 2 Januari 2024	ANT. Totok Purwoirawan, S.K.M., M.Acc	Sekretaris Inspektorat DIY

A. Temuan

1. Dasar Pelaksanaan Program PAK dan MCP

Inspektorat DIY selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan di wilayah Provinsi DIY. Berdasarkan hal tersebut Inspektorat DIY bertugas sebagai leading sector/koordinator pada program PAK dan MCP. Pada Inspektorat DIY, bidang Sub Bagian Program dan Monitoring Evaluasi menjadi pengampu dalam pelaksanaan program PAK dan MCP di wilayah Pemerintah Provinsi DIY. Berdasarkan pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat disebutkan tugas pokok dan fungsi bidang Sub Bagian Program dan Monitoring Evaluasi salah satunya, yaitu melakukan pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi.

> "*Program PAK dan MCP diampu oleh sekretariat khususnya pada sub bagian program dan monitoring evaluasi*" (Wawancara dengan Bernardinus Norowisnu, S.Kom., M.Hum selaku Kepala Sub Bagian Program dan Monev, 8 Desember 2023)

Terdapat Trisula strategi pemberantasan korupsi yaitu penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Pada sula penindakan, yaitu berhubungan dengan sanksi tindakan hukum yang diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Pada tahap pencegahan, dilakukan penguatan sistem pemerintahan pada pelayanan publik yang diharapkan dapat menghindari dari terjadinya tindakan korupsi yang meliputi gratifikasi, penerimaan suap, dan sebagainya. Sedangkan, upaya pemberantasan korupsi pada sula pendidikan, merupakan cara yang dilakukan melalui edukasi terkait dengan tindak pidana korupsi. Dengan cara tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dari masyarakat untuk dapat mengenali dan memahami dampak bahaya korupsi, serta dapat mengajak masyarakat lain untuk terlibat pada upaya pemberantasan korupsi (aclc.kpk.go.id).

a. Program Penyuluh Anti Korupsi (PAK)

Program PAK merupakan program penyuluhan anti korupsi yang ditujukan selain kepada unsur pemerintahan atau pelayanan publik, juga ditujukan bagi masyarakat luas. Adanya program PAK dilatarbelakangi oleh upaya KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi melalui sula pendidikan. Namun keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang dimiliki KPK tidak memadai dan proses edukasi kepada masyarakat menjadi terhambat. Sehingga melalui surat KPK Nomor B/1404/DKM.00.04/10-17/03/2020 tanggal 13 Maret 2020 menunjuk Inspektorat Daerah untuk bekerja sama dengan KPK, dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal tersebut dilakukan untuk mengajak masyarakat berpartisipasi aktif turut serta dalam menyebarluaskan pemahaman terkait dengan tindak pidana korupsi. Pada pelaksanaan program PAK, fasilitas anggaran maupun fasilitas sarana prasarana melalui Inspektorat DIY. Sekretariat PAKSIJI berada di Inspektorat DIY yang beralamat di Jalan Cendana No.40, Semaki, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekretariat PAKSIJI berfungsi sebagai tempat pertemuan maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh para penyuluh anti korupsi di DIY.

> "*Dasar dari "trisula" pemberantasan korupsi yaitu penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Dari sisi pendidikan dahulu dianggap masih belum terlihat, sehingga karena sumber daya KPK terbatas, maka perlu partisipasi dari banyak orang. Jadi konsep sertifikasi penyuluh anti*

korupsi dibuat untuk membantu dari sisi pendidikan ke masyarakat. Di setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing, di Jogja diberi nama PAKSIJI Sahabat Integritas Jogja Istimewa" (Wawancara dengan Bernardinus Norowisnu, S.Kom., M.Hum selaku Kepala Sub Bagian Program dan Monev, 8 Desember 2023)



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/1404/DKM.00.04/10-17/03/2020 13 Maret 2020
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (Dua) Berkas
Perihal : Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi bagi Inspektorat Daerah

Kepada Yth.
Gubernur Provinsi (terlampir)
di tempat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 jo Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa KPK berwenang melaksanakan upaya-upaya pencegahan korupsi dan salah satu bentuknya adalah melalui rekomendasi KPK kepada Presiden untuk penguatan APIP Pemerintah Daerah. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, diharapkan agar APIP dapat lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi di daerah yang selama ini diinisiasi oleh KPK maupun kementerian/lembaga lain dikoordinasikan oleh inspektorat daerah/Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

Untuk menunjang fungsi tersebut, diperlukan peningkatan kemampuan dan kompetensi serta integritas personil APIP. Untuk Standardisasi pemahaman dan keterampilan antikorupsi bagi APIP, dilaksanakan melalui Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Nomor 303 Tahun 2016 tentang Penyuluh Antikorupsi.

Berdasarkan hal tersebut, mulai tahun 2020 ini, KPK merencanakan program Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi kepada APIP pemerintah daerah di Indonesia. Setiap Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota diharapkan memiliki minimal 2 (dua) orang APIP yang bersertifikat Penyuluh Antikorupsi.

Untuk menunjang program tersebut, kami mengharapkan kerjasama saudara untuk:

1. Menugaskan 5 personel inspektorat daerah/APIP provinsi yang memiliki komitmen antikorupsi dan memenuhi syarat untuk mengikuti sertifikasi penyuluh antikorupsi (terlampir)
2. Menyediakan Tempat Uji Kompetensi (TUK) di BPSDM Provinsi untuk pelaksanaan asesmen uji kompetensi sesuai dengan ketentuan Lembaga Sertifikasi Profesi KPK (terlampir)

Gambar 3. 1 Surat Undangan KPK Nomor B/1404/DKM.00.04/10-17/03/
Sumber: Dokumentasi Inspektorat DIY

b. Program Monitoring Center For Prevention (MCP)

Program MCP merupakan salah satu bentuk strategi pencegahan korupsi melalui pembangunan sistem pelaksanaan tata kelola pemerintahan. Program MCP berfokus pada upaya untuk membangun sistem tata kelola pemerintahan yang baik.

"*Yang melatar belakangi adanya program MCP karena masih tingginya tingkat korupsi di Indonesia dilihat dari Indek Persepsi Korupsi jadi dirasa perlu suatu langkah agar pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat berjalan dengan baik. Harapannya MCP dapat menjadi tools yang dapat digunakan oleh Pemda untuk menilai sejauh mana keberhasilan implementasi perbaikan tata kelola pemerintahan selama kurun waktu 1 tahun"* (Wawancara dengan Bernardinus Norowisnu, S.Kom., M.Hum selaku Kepala Sub Bagian Program dan Monev, 8 Desember 2023

Dalam menjalankan suatu program diperlukan pedoman yang dapat berguna sebagai panduan dalam menyusun perencanaan kegiatan. Terdapat pedoman yang digunakan Inspektorat DIY dalam melaksanakan program MCP, yaitu "Pedoman Penilaian Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah melalui Monitoring Center for Prevention (MCP)" yang disusun oleh KPK, Kemendagri, dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pada pedoman tersebut terdapat pembahasan mengenai delapan fokus area intervensi yang menjadi titik rawan terjadinya korupsi yaitu, perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), penguatan kapasitas Aparat Pengawas Internal

Pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola dana desa. Dalam hal ini, Inspektorat DIY bertugas untuk mengkoordinasikan dan mensosialisasikan program MCP kepada instansi di wilayah provinsi DIY yang berkaitan dengan area intervensi titik rawan terjadinya korupsi.



Gambar 3. 2 Buku “Pedoman Penilaian Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah melalui MCP“
Sumber: Dokumentasi Inspektorat DIY

2. Perencanaan Komunikasi Inspektorat DIY dalam Upaya Pemberantasan Korupsi melalui Program Penyuluh Anti Korupsi (PAK) dan Monitoring Center For Prevention (MCP)

Definisi perencanaan komunikasi menurut Cangara (2013: 33) adalah panduan yang disusun untuk menentukan serangkaian tindakan yang diambil dalam mendukung proses pertukaran informasi, sehingga komunikasi yang berlangsung dapat terencana dan menghindari terjadinya hambatan pada proses komunikasi. Program PAK dan MCP menjadi program kegiatan yang dilakukan sebagai upaya pencegahan dan penerapan sula pendidikan budaya anti korupsi. Sebelum melaksanakan kegiatan pada program PAK dan MCP, Inspektorat DIY menyusun perencanaan terlebih dahulu. Penyusunan perencanaan yang dilakukan oleh Inspektorat DIY menjadi langkah dalam menindaklanjuti upaya KPK guna melakukan pemberantasan korupsi melalui program PAK dan MCP.

Perencanaan komunikasi yang disusun oleh Inspektorat DIY dilatarbelakangi karena adanya tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh Inspektorat DIY. Berdasarkan pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2022, Inspektorat memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan pada kegiatan pemerintahan di wilayah provinsi dan melakukan pembinaan pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Selain itu

terdapat surat KPK Nomor B/1404/DKM.00.04/1017/03/2020, yang berisi tentang kerja sama antara KPK dengan Inspektorat Daerah, dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan pada program PAK dan MCP, Inspektorat DIY menyusun perencanaan komunikasi terlebih dahulu. Menurut Cangara (2013: 25) salah satu pokok pikiran yang terkandung dalam suatu perencanaan adalah berorientasi pada masa depan. Hal tersebut dilakukan karena dengan adanya perencanaan komunikasi dapat membantu untuk menentukan segala langkah atau strategi yang akan ditempuh di masa yang akan datang dalam menjalankan program PAK dan MCP.

Menyusun perencanaan menjadi langkah awal yang dilakukan oleh Inspektorat DIY untuk melaksanakan program PAK dan MCP. Menurut Widjajanto (2013: 4) dalam perencanaan terdapat pengambilan keputusan dan tindakan yang perlu ditentukan. Keputusan atau tindakan yang telah ditentukan mendasar pada perencanaan yang disusun.

> *"Selama ini pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan perencanaan karena biasanya perencanaan sudah disusun secara matang mulai dari penentuan audiens, tema yang dipilih, hingga waktu pelaksanaan. Hal yang mungkin tidak sesuai dengan perencanaan justru pada narasumber. Terkadang narasumber yang telah ditentukan berhalangan hadir, sehingga narasumber tersebut diganti dengan narasumber yang lain. Kami memiliki list daftar narasumber yang gunanya sebagai urutan jadwal untuk melakukan penyuluhan*." (Wawancara dengan Totok Purwoirawan, S.Km.M.Acc. selaku Sekretaris Inspektorat DIY, 2 Januari 2024)

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pengambilan keputusan yang dilakukan pada kegiatan program PAK dan MCP telah sesuai dengan perencanaan yang disusun sebelumnya. Namun untuk mengantisipasi apabila pada pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat, Inspektorat DIY telah mempersiapkan perencanaan cadangan. Seperti pada perencanaan cadangan yang telah dipersiapkan PAKSIJI untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan anti korupsi pada program PAK. PAKSIJI memiliki daftar nama narasumber yang telah terjadwal untuk melakukan penyuluhan anti korupsi. Sehingga hal tersebut dapat mengantisipasi terjadinya hambatan dalam pelaksanaan program, apabila narasumber yang telah ditetapkan sebelumnya berhalangan hadir maka sudah tersedia alternatif narasumber yang dapat langsung menggantikannya.

Dalam menyusun suatu perencanaan komunikasi, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi pembahasan, supaya perencanaan komunikasi yang disusun

lebih terarah dan dapat sebagai acuan atau pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Perencanaan menjadi tahap awal bagi Inspektorat DIY untuk mempermudah melanjutkan ke tahap pelaksanaan program kegiatan. Menurut Cangara (2013: 49) perencanaan komunikasi didefinisikan sebagai dokumen tertulis yang di dalamnya terdapat pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab, yaitu dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Target Capaian pada Program PAK dan MCP

Dalam setiap perencanaan terdapat suatu tujuan yang ingin dicapai. Fungsi perencanaan adalah sebagai panduan untuk memberikan arahan pada capaian tujuan yang diharapkan (Cangara 2013: 25). Pada program PAK, Inspektorat DIY menentukan capaian yang diinginkan mendasar pada latar belakang dari adanya upaya pemberantasan korupsi melalui program PAK. Target capaian yang diharapkan Inspektorat DIY dalam melaksanakan program PAK adalah terlaksananya sosialisasi penyuluhan anti korupsi dan penyebaran pesan anti korupsi dapat menjangkau ke seluruh masyarakat. Selain itu, Inspektorat DIY menginginkan supaya masyarakat dapat ikut serta menyebarkan pesan anti korupsi di lingkungan sekitar sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

> "*Tersampaikan subtstansi kegiatan kepada masyarakat dan berharap mereka akan dapat mempengaruhi sekitarnya dengan cara dan kemampuannya sendiri*" (Wawancara dengan Maharyo, S.T,M.M. selaku Inspektur Pembantu Sarana Prasarana Inspektorat DIY, 12 Desember 2023)

Sesuai dengan buku pedoman MCP pada poin pengawasan APIP, disebutkan bahwa masih banyak pihak yang belum memahami tentang kebijakan anti korupsi. Sehingga perlu dilakukan sosialisasi untuk mengingatkan kembali mengenai implementasi kebijakan antikorupsi di daerah. Berdasarkan hal tersebut fokus pada program MCP adalah terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan tujuh area intervensi yang telah ditetapkan pada pedoman MCP. Inspektorat DIY selaku leading sector/kooordinator pada program MCP di wilayah Pemerintah Provinsi DIY bertugas untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan program MCP kepada pihak terkait supaya tujuan dari adanya program MCP dapat terwujud.

> "*Target kami bisa mendorong pemerintah daerah dapat melakukan transformasi nilai dan praktek pemerintahan daerah dalam 7 area tersebut*" (Wawancara dengan Totok Purwoirawan, S.Km.M.Acc. selaku Sekretaris Inspektorat DIY, 2 Januari 2024)

b. Hal yang Menjadi Latar Belakang

Upaya yang dilakukan Inspektorat DIY dalam memberantas tindak pidana korupsi, yaitu dengan melaksanakan program PAK dan MCP. Sesuai dengan PP Nomor 72 Tahun 2019 yang mengatur bahwa Inspektorat bertugas melaksanakan tugas koordinasi pencegahan korupsi di Pemerintahan Daerah. Program PAK dan MCP merupakan program yang dirancang oleh KPK sebagai upaya pemberantasan korupsi. Dalam melakukan pemberantasan korupsi, penting untuk menerapkan trisula strategi pemberantasan korupsi yaitu penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Fokus program PAK adalah penerapan sula pendidikan yaitu melalui penyuluhan anti korupsi yang ditujukan untuk masyarakat luas, sedangkan pada program MCP berfokus pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menerapkan sula pencegahan bagi pemerintahan daerah.

Pada sula pendidikan, tindakan yang perlu dilakukan adalah memberikan penyuluhan anti korupsi terhadap seluruh masyarakat. Dimana hal tersebut memerlukan jumlah sumber daya yang tidak sedikit. Namun, jumlah sumber daya penyuluh anti korupsi yang dimiliki KPK untuk menyampaikan pesan anti korupsi masih sangat rendah. Sehingga KPK perlu untuk bekerjasama dengan Inspektorat Daerah dalam pelaksanaan penyuluhan anti korupsi. Perlu adanya sinergisitas antara KPK dengan instansi daerah untuk dapat menyebarluaskan pesan anti korupsi terhadap masyarakat.

Adanya program MCP dilatarbelakangi dari banyaknya kasus korupsi yang masih sering terjadi di Indonesia. Tidak hanya terjadi di tingkat pemerintahan pusat, namun juga terjadi di pemerintahan daerah. Pada program MCP, dimana Inspektorat Daerah memiliki tugas untuk mensosialisasikan dan mengkoordinasikan kepada instansi di tingkat daerah untuk melakukan pemenuhan dokumen sesuai dengan tujuh area intervensi pada pedoman MCP yakni perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), penguatan kapasitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, dan manajemen aset daerah. Dengan terpenuhinya tujuh area intervensi tersebut, diharapkan pemerintah daerah dapat terhindar dari tindak pidana korupsi.

c. Menetapkan Target Sasaran

Memahami target *audiens* menjadi hal yang sangat penting dalam proses komunikasi. Kegiatan penyuluhan anti korupsi yang dilakukan PAKSIJI menyasar berbagai kalangan masyarakat. Sasaran target *audiens* di setiap kegiatan penyuluhan berbeda-beda. Tidak hanya pegawai pemerintahan saja, namun juga dari kalangan dosen, pelajar, mahasiswa, maupun masyarakat menyesuaikan dengan undangan permintaan, keadaan, atau melihat dari isu-isu yang sedang berkembang di masyarakat. Pendekatan tersebut dilakukan untuk dapat mencakup berbagai kalangan masyarakat, mengingat tindakan korupsi dapat terjadi kapan dan dimana saja karena adanya kesempatan.

Menurut Cangara (2013: 137) pengelompokan karakteristik dapat dibedakan berdasarkan dari segmentasi sosiodemografi, psikologi, dan perilaku. Pengelompokan berdasarkan segmentasi sosiodemografi, psikologi, dan perilaku, tidak semuanya diterapkan oleh Inspektorat DIY. Target sasaran pada program PAK ditetapkan berdasarkan dari segmentasi sosiodemografi. Pengelompokan usia, pekerjaan, dan pendidikan menjadi faktor utama dalam penetapan target sasaran.

Program MCP berfokus pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik, dimana terdapat delapan area intervensi yang menjadi fokus pencegahan korupsi di tingkat instansi, yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), penguatan kapasitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola dana desa. Pada poin area intervensi tata kelola dana desa tidak ada di tingkat provinsi.

> "*Target sasarannya adalah Perangkat Daerah pengampu 7 area intervensi tersebut*" (Wawancara dengan Totok Purwoirawan, S.Km.M.Acc. selaku Sekretaris Inspektorat DIY, 2 Januari 2024)

Fokus target sasaran pada program MCP berdasarkan dari pedoman MCP, adalah seluruh pegawai pemerintah daerah terkait dengan tujuh area intervensi pada program MCP. Sehingga berdasarkan hal tersebut, Inspektorat DIY menentukan target sasaran berdasarkan dari pedoman MCP. Target utama dalam pelaksanaan sosialisasi dan koordinasi pada program MCP di Provinsi DIY adalah Instansi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DIY.

d. Penggunaan Kata Kunci Pesan berupa Jargon dalam Menyampaikan Pesan Anti Korupsi

Program PAK dan MCP merupakan program kegiatan yang bertujuan untuk memberikan edukasi dan pencegahan terhadap perilaku korupsi. Isi pesan yang disampaikan adalah penanaman budaya dan nilai-nilai anti korupsi kepada berbagai kalangan masyarakat di wilayah provinsi DIY. Tindakan korupsi dapat terjadi dimana saja, tidak hanya dapat terjadi pada pegawai pemerintahan namun dapat terjadi juga dalam kehidupan bermasyarakat. Inspektorat DIY menargetkan untuk dapat menyampaikan pesan anti korupsi kepada berbagai kalangan, supaya lebih banyak masyarakat yang menerapkan perilaku anti korupsi dan ikut menyebarluaskan pesan anti korupsi di lingkungan sekitarnya.

Pesan dapat disampaikan dengan dua cara, yakni verbal dan non-verbal. Tidak hanya berasal dari bahasa dalam bentuk kata-kata, namun juga dapat disampaikan menggunakan bahasa tubuh (Cangara 2013: 139). Dalam menyampaikan pesan-pesan anti korupsi, PAKSIJI memiliki kata kunci pesan atau jargon yang biasa digunakan yaitu “PAKSIJI Penyuluh Anti Korupsi Sahabat Integritas Jogja Istimewa: Jujur, Berani, Beraksi“. Selain itu juga terdapat jargon “LIHAT, LAWAN, LAPORKAN, TOLAK KORUPSI“. Jargon-jargon tersebut diucapkan dan diikuti dengan gerakan tangan sebagai bentuk komunikasi menggunakan bahasa tubuh.

Untuk dapat mempermudah masyarakat dalam mengingat pesan, kerapkali pesan yang disampaikan menggunakan akronim dari penjelasan suatu kalimat. Seperti pada pesan mengenai sembilan nilai-nilai anti korupsi yang sering disebut dengan istilah “JUMAT BERSEPEDA KAKA“ yang artinya jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras. Selain itu PAKSIJI kerap menunjukan gestur tubuh yang mengandung makna pesan penolakan terhadap perilaku korupsi dengan menggunakan telapak tangan yang diarahkan ke depan dan mengucapkan “Tolak Korupsi“. Menurut Mulyana (2004: 159) bahasa tubuh sebagai salah satu bentuk komunikasi non verbal yang sama pentingnya dengan komunikasi verbal.



Gambar 3. 3 Gerakan Gestur Tubuh “Tolak Korupsi“
Sumber: https://www.instagram.com/pak_siji_diy

Pada program MCP dalam rangka upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik, Inspektorat DIY melakukan sosialisasi dan koordinasi bagi pemerintah daerah. Sosialisasi dan koordinasi dilakukan dengan tujuan untuk menyampaikan pesan terkait dengan tujuh area intervensi yang menjadi fokus pada perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai dengan pedoman MCP. Penyampaian pesan yang dilakukan Inspektorat DIY kepada komunikan berbentuk verbal yaitu menggunakan bahasa dalam bentuk kata-kata. Inspektorat DIY mendorong seluruh instansi pemerintah di tingkat Provinsi DIY, untuk dapat memenuhi parameter yang menjadi tolok ukur keberhasilan pencapaian penilaian sesuai dengan area intervensi pada pedoman MCP.

e. Pemilihan Komunikator

Narasumber yang dapat melakukan penyuluhan anti korupsi adalah orang yang telah mengikuti sertifikasi nasional. Sertifikasi pada program PAK diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi nasional yaitu LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) KPK. Dengan adanya sertifikasi tersebut dapat mengukur kapasitas dan pemahaman bagi para penyuluh anti korupsi yang akan melakukan penyuluhan. Peserta yang telah mengikuti sertifikasi dan dinyatakan lulus oleh LSP-KPK berhak untuk melaksanakan penyuluhan anti korupsi sebagai narasumber. Hal tersebut dapat menunjukan kredibilitas dari seorang komunikator. Salah satu bentuk kredibilitas komunikator dapat dilihat dari kompetensinya. Kompetensi adalah penguasaan isi pesan yang disampaikan oleh komunikator terhadap komunikan (Cangara 2007: 94).

PAKSIJI membuat jadwal yang tersusun untuk menentukan narasumber pada setiap kegiatan yang dilakukan, sehingga para penyuluh dapat secara bergiliran melakukan kegiatan penyuluhan anti korupsi sesuai dengan giliran yang telah ditentukan.

> “*Narasumber ditunjuk berdasarkan kapasitas dan pemahaman yang dimiliki dan juga berdasarkan dari pengalaman narasumber. Terdapat jadwal yang sudah disusun sehingga narasumber yang akan bertugas*

sesuai dengan giliran urutan yang sesuai dengan jadwal." (Wawancara dengan Maharyo, S.T,M.M. selaku Inspektur Pembantu Sarana Prasarana Inspektorat DIY, 12 Desember 2023)

Inspektorat DIY melalui Sekretariat dan Sub Bagian Program dan Monitoring Evaluasi selaku bidang pengampu program MCP, menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan koordinasi. Inspektorat DIY mengundang perangkat daerah atau instansi di wilayah provinsi DIY yang terlibat pada tujuh area intervensi pada program MCP. Sekretariat dan Sub Bagian Program dan Monitoring Evaluasi berperan sebagai komunikator utama dan menjadi pihak yang bertanggung jawab pada setiap kegiatan sosialisasi dan koordinasi yang diselenggarakan.

"*Penyampaian materi disampaikan oleh bidang pengampu yaitu di bidang sub bagian program dan monev*" (Wawancara dengan Totok Purwoirawan, S.Km.M.Acc. selaku Sekretaris Inspektorat DIY, 2 Januari 2024)

f. Cara dalam Mencapai Tujuan

Inspektorat DIY merupakan *leading sector*/koordinator pada program PAK dan MCP di wilayah Pemerintah Provinsi DIY. Berdasarkan hal tersebut Inspektorat DIY bertanggungjawab untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi di wilayah Pemerintah Provinsi DIY. Program PAK dan MCP yang dilaksanakan oleh Inspektorat DIY, dilakukan dengan melalui tahapan-tahapan dalam perencanaan komunikasi. Perencanaan komunikasi berfungsi sebagai penuntun dalam melaksanakan kegiatan komunikasi. Perencanaan komunikasi dapat membantu suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi (Cangara, 2013: 50).

Upaya yang dilakukan Inspektorat DIY untuk dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai baik pada program PAK maupun MCP yaitu dengan mempersiapkan perencanaan komunikasi sebagai pedoman sebelum melalui tahap pelaksanaan. Pada tahap awal perencanaan Inspektorat DIY melakukan riset terlebih dahulu. Riset yang dilakukan Inspektorat DIY melalui monitoring yaitu dengan melihat perkembangan pada isu yang terjadi. Mulai dari pemilihan media, penetapan target sasaran, dan penetapan tujuan ditentukan berdasarkan dari riset yang dilakukan. Dengan adanya undangan dari KPK yang disampaikan kepada Inspektorat DIY serta Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat, menjadi latar belakang pelaksanaan riset yang dilakukan oleh Inspektorat DIY dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi.

"*Tidak ada penelitian yang dilakukan secara spesifik, tapi biasanya ada masukan atau menangkap isu-isu yang berkembang di masyarakat, biasanya kami berdasarkan segmentasi profesi, lalu juga berdasarkan dari kelompok masyarakat tertentu.*" (Wawancara dengan Bernardinus Norowisnu, S.Kom., M.Hum selaku Kepala Sub Bagian Program dan Monev, 8 Desember 2023)

g. Jenis Media

Media menjadi alat yang digunakan oleh pengirim pesan kepada penerima pesan (Cangara 2013: 37). Inspektorat DIY melaksanakan program PAK dan MCP dengan menggunakan berbagai jenis media. Inspektorat DIY menentukan jenis media yang digunakan untuk menyampaikan pesan anti korupsi berdasarkan dari target *audiens* yang disasar.

"Media yang digunakan seperti instagram, youtube, lagu, penerbitan buku puisi antikorupsi, dan website PAK. Alasannya karena pemilihan media tersebut efektif dalam mengenalkan budaya anti korupsi dengan cara mempengaruhi orang setiap hari, setiap saat. Penerbitan buku sangat cocok bagi para siswa, akademisi dan budayawan dalam mengembangkan budaya antikorupsi tanpa menggurui. Jika website dirasa efektif karena saat ini media online dan internet memegang kendali dalam pencarian berbagai informasi dan pembelajaran." (Wawancara dengan Maharyo, S.T,M.M. selaku Inspektur Pembantu Sarana Prasarana Inspektorat DIY, 12 Desember 2023).

Berdasarkan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa Inspektorat DIY memaksimalkan berbagai jenis media, supaya dapat menjangkau berbagai kalangan di masyarakat. Sebelum menentukan penggunaan media sebagai sarana penyampaian pesan, perlu diketahui manfaat dan kerateristik dari masing-masing media, sehingga penetapan media dapat sesuai dengan karakteristik target sasaran.

Pada strategi komunikasi Pendidikan Budaya Anti Korupsi (PBAK) yang dilakukan oleh Direktorat Operasi Sumber Daya, Ditjen SDPPI Kominfo dalam penelitian Luthfitasari dan Nugrahani, pemilihan media yang digunakan komunikator untuk menyampaikan pesan kepada komunikan, ditetapkan sesuai karakteristik pada komunikan. Hal tersebut mendukung penelitian ini, bahwa pemilihan media berdasarkan dari karakteristik target sasaran menjadi salah satu hal penting. Namun pada penelitian tersebut tidak menjelaskan terkait perencanaan komunikasi dan penggunaan media pada kegiatan yang dilaksanakan. Sehingga hal tersebut menjadi kebaruan pada penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya (Luthfitasari dan Nugrahani, 2017).

Penggunaan media yang dilakukan oleh Inspektorat DIY dalam melaksanakan program PAK dan MCP cukup beragam. Media digunakan

sebagai sarana untuk memperluas cakupan pesan anti korupsi kepada masyarakat Yogyakarta. Media yang digunakan antara lain media cetak meliputi banner dan buku, media lagu, media radio, media sosial, dan media luar jaringan. Karakteristik dari media-media tersebut memiliki keperuntukan yang berbeda-beda. Dalam menentukan media yang akan digunakan hal pertama yang menjadi pertimbangan adalah tujuan untuk dapat menyebarkan pesan anti korupsi seluas-luasnya kepada masyarakat Yogyakarta dari berbagai kalangan.

Inspektorat DIY menggunakan media sosial seperti instagram dan youtube karena dianggap sebagai sarana yang efektif untuk memberikan pengenalan mengenai budaya anti korupsi kepada berbagai target audiens. Masyarakat dapat mengakses media sosial kapan dan dimana saja selama masih terkoneksi dengan jaringan internet. Selain menggunakan media online, kegiatan juga dilaksanakan secara offline. Inspektorat DIY menyampaikan pesan anti korupsi dalam bentuk sosialisasi secara tatap muka dan melalui aplikasi Zoom.

h. Penetapan Waktu Kegiatan

Pada perencanaan komunikasi, menentukan waktu kegiatan merupakan salah satu hal yang perlu untuk diperhatikan. Penentuan waktu yang dilakukan PAKSIJI dalam melaksanakan program PAK seringkali bersamaan dengan peringatan hari tertentu. Waktu pelaksanaan kegiatan merujuk pada momen-momen dalam rangka memperingati hari tertentu seperti Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA), Hari Pendidikan Nasional, Hari Kebangkitan Nasional, Hari RA Kartini, dan sebagainya. Selain itu juga mendasar atas undangan yang ditujukan kepada PAKSIJI untuk melakukan sosialisasi.

> "*Biasanya disesuaikan dengan momen-momen tertentu, misalnya Hari Anti Korupsi Sedunia atau HAKORDIA, hari Pendidikan Nasional, Hari Kebangkitan Nasional, RA Kartini, dan sebagainya*" (Wawancara dengan Totok Purwoirawan, S.Km.M.Acc. selaku Sekretaris Inspektorat DIY, 2 Januari 2024)

Sedangkan pada program MCP, waktu pelaksanaan dilakukan oleh Inspektorat DIY selaku koordinator MCP di pemerintah provinsi DIY secara rutin setiap triwulan sekali dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan koordinasi sesuai dengan jadwal input pemenuhan dokumen di aplikasi jaga.id.

"*Evaluasi atas program capaian MCP KPK dilakukan setiap triwulan, dimana Inspektorat akan mengadakan evaluasi atas capaian pelaporan dari satuan kerja pengampu MCP KPK terkait tujuh area intervensi dapat menyerahkan data dukungnya yang nanti akan dilakukan penilaian oleh KPK melalui aplikasi jaga.id.*" (Wawancara dengan Bernardinus Norowisnu, S.Kom., M.Hum selaku Kepala Sub Bagian Program dan Monev, 8 Desember 2023)

i. Evaluasi Program

Tahap evaluasi program dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui penilaian keberhasilan pada kegiatan yang telah dilakukan (Cangara 2013: 174). Pada tahap perencanaan evaluasi program, berdasarkan adanya surat undangan KPK Nomor B/1404/DKM.00.04/10-17/03/2020 yang ditujukan kepada Gubernur DIY, perihal sertifikasi PAK bagi Inspektorat Daerah yang disampaikan pada 13 Maret 2020. Inspektorat DIY yang ditunjuk sebagai leading sector/koordinator kemudian menindaklanjuti surat tersebut dengan cara melakukan koordinasi dan menyebarluaskan surat undangan tersebut kepada instansi-instansi di DIY untuk ikut serta dalam program PAK.

Inspektorat DIY ditugaskan untuk membentuk forum penyuluh anti korupsi di Provinsi DIY yang diberi nama yaitu forum PAKSIJI. Berdasarkan dari data penyuluh antikorupsi LSP ACLC KPK RI pada tahun 2021 jumlah anggota PAKSIJI mencapai 54 anggota hingga saat ini menjadi 85 anggota. Jumlah tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi, supaya dapat meningkat dan lebih banyak masyarakat yang tertarik sebagai penyuluh anti korupsi untuk ikut serta menyebarkan pesan anti korupsi. Selain itu, evaluasi yang dilakukan dilihat dari pelaksanaan program kegiatan yang telah dilakukan disesuaikan dengan perencanaan yang disusun.

"*Sampai saat ini, pelaksanaan kegiatan yang kami lakukan sesuai dengan perencanaan yang dibuat*" (Wawancara dengan Bernardinus Norowisnu, S.Kom., M.Hum selaku Kepala Sub Bagian Program dan Monev, 8 Desember 2023)

Tahap evaluasi pada program MCP, dilakukan dengan melihat dari laporan penilaian MCP KPK. Penilaian tersebut menjadi bahan evaluasi Inspektorat DIY untuk dapat terus mendorong Pemerintah di wilayah Provinsi DIY untuk terus meningkatkan sistem tata kelola kinerja pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

"Bahan evaluasi mendasar dari evaluasi yang dilakukan oleh tim MCP KPK dengan memberikan feedback dari dokumen-dokumen pendukung yang telah diunggah di jaga.id dan nanti akhirnya memberikan nilai MCP untuk Pemda DIY. Nantinya kami melaksanakan evaluasi bersama setiap triwulan." (Wawancara dengan Totok Purwoirawan, S.Km.M.Acc. selaku Sekretaris Inspektorat DIY, 2 Januari 2024)

3. Strategi Komunikasi Inspektorat DIY dalam Upaya Pemberantasan Korupsi melalui Program Penyuluh Anti Korupsi (PAK) dan Monitoring Center For Prevention (MCP)

Strategi komunikasi menurut Effendy (2009: 32) adalah pedoman yang berfungsi untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa strategi komunikasi membahas mengenai kiat dan cara suatu kegiatan dilakukan secara praktis, dengan pendekatan yang tidak sama satu dan lainnya atau tergantung pada keadaan situasi dan kondisi. Menurut Cangara (2007:165), tujuan dari adanya kegiatan komunikasi adalah menyampaikan pesan kepada komunikan dan dapat memberikan pengaruh yang berdampak pada pengetahuan, sikap, dan perilaku komunikan.

Dalam buku yang berjudul "Cetak Biru Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi (PBAK)" yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, terdapat panduan atau kiat-kiat kegiatan yang dapat dilakukan dalam melaksanakan pendidikan budaya anti korupsi. Dalam hal ini secara spesifik strategi komunikasi yang telah dilaksanakan Inspektorat DIY dalam rangka upaya pemberantasan korupsi melalui program PAK dan MCP adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan Penggunaan Media Massa sebagai Sarana Komunikasi dan Media PBAK

1) Bekerjasama Dengan Stasiun Radio dan Televisi Lembaga Penyiaran Publik di Indonesia

a) Talkshow "Ranah Publik" TVRI Yogyakarta

TVRI Yogyakarta memiliki program acara Talkshow "Ranah Publik", dimana pada program tersebut kerap mengundang pembicara dalam menyampaikan suatu informasi tertentu. Pada Selasa, 1 November 2022, TVRI Yogyakarta mengundang PAKSIJI menjadi pembicara untuk membahas mengenai isu permasalahan korupsi. Pada kegiatan ini yang menjadi tema pembahasan adalah "Peran Serta Masyarakat dalam Membangun DIY Bebas dari Korupsi". PAKSIJI mengharapkan masyarakat dapat lebih peduli terhadap isu-isu korupsi. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Studio TVRI Yogyakarta dan disiarkan secara langsung.



Gambar 3. 4 TVRI Yogyakarta “Peran Serta Masyarakat dalam Membangun DIY Bebas dari Korupsi”
Sumber: https://www.instagram.com/pak_siji_diy/

b) Radio Republik Indonesia (RRI) Jogja Official

PAKSIJI hadir pada program “Dialog Jogja Pagi Ini“ sebagai narasumber. Program “Dialog Jogja Pagi Ini“ diselenggarakan oleh RRI Jogja Official, program tersebut berisikan tentang informasi-informasi yang ditujukan bagi masyarakat luas, dimana masyarakat dapat menyaksikan secara langsung melalui kanal Youtube RRI Jogja Official. Pada hari Rabu, 18 Oktober 2023 PAKSIJI menghadiri acara “Dialog Jogja Pagi Ini“ yang membahas mengenai tema “Keluarga Sebagai Garda Terdepan Anti Rasuah”. Pesan yang disampaikan pada kegiatan tersebut adalah peran penting sebuah keluarga sebagai penanaman awal dan pendidikan dasar yang dapat mempengaruhi perilaku dan budaya anti korupsi di masa mendatang. Keluarga melalui orang tua perlu mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai anti korupsi secara konsistensi serta mampu menjadi contoh teladan bagi anak-anak. Terdapat hal-hal kecil yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu seperti selalu berperilaku disiplin serta jujur.

Selain itu, pada hari Jumat, 8 Desember 2023 RRI Jogja Official kembali mengundang PAKSIJI pada program “Dialog Jogja Pagi Ini“. Tema yang diusung adalah “Mimpi Negeri Tanpa Korupsi”. Kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka menjelang peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia. PAKSIJI hadir sebagai pembicara bersama dengan Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) UGM. Pada kegiatan tersebut PAKSIJI menyampaikan terdapat sembilan nilai-nilai anti korupsi yang sering disebut dengan istilah “JUMAT BERSEPEDA KAKA“ yang artinya jujur, mandiri, tangggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras. Hal tersebut perlu untuk ditanamkan pada diri sehingga semangat anti korupsi dapat diterapkan di lingkungan kerja dan masyarakat.



Gambar 3. 5 Pamflet Dialog Jogja Pagi Ini
Sumber:https://www.instagram.com/pak_siji_diy/

2) Media Youtube

a) Youtube Humas Jogja

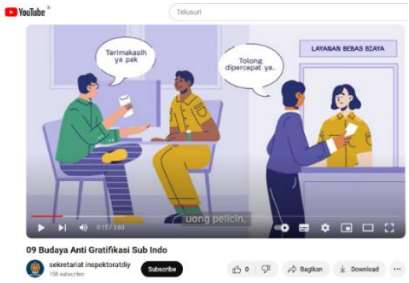
Forum Penyuluh Anti Korupsi Sahabat Integritas Jogja Istimewa (PAK SIJI DIY) bekerjasama dengan Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI dan Pemerintah Daerah DIY menyelenggarakan webinar “Peran Perempuan Dalam Melawan Korupsi“. Webinar “Peran Perempuan Dalam Melawan Korupsi“ merupakan kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Kartini 2021. Dalam kegiatan webinar tersebut terdapat beberapa topik pembahasan yaitu, meneladani nilai luhur RA Kartini, cara mengenalkan integritas pada keluarga, dan prophetic value dalam membangun perilaku antikorupsi. Pesan yang disampaikan pada webinar tersebut adalah perempuan memiliki peranan yang penting dalam mencegah terjadinya perilaku korupsi, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara penerapan perilaku yang menunjukan sebagai perempuan yang memiliki sikap penuh rasa kejujuran dan menanamkan integritas pada diri, serta menerapkan norma hidup yang baik pada anak-anak di rumah. Webinar “Peran Perempuan Dalam Melawan Korupsi“ disiarkan secara langsung melalui channel Youtube Humas Jogja.



Gambar 3. 6 “Peran Perempuan Dalam Melawan Korupsi” pada Youtube Humas Jogja
Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=SovooCsSVjc

b) Youtube Sekretariat Inspektorat DIY

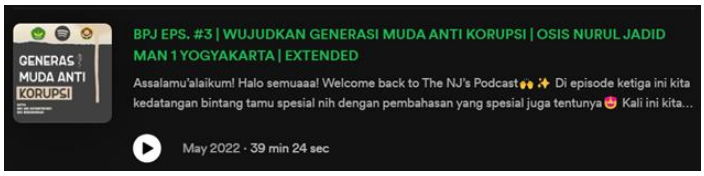
Dalam fokus area intervensi yang menjadi titik rawan terjadinya korupsi sesuai dengan amanat pada pedoman MCP, salah satu fokus areanya adalah penguatan kapasitas APIP dan manajemen ASN. Salah satu tugas APIP dan ASN adalah memberikan pelayanan yang baik terhadap publik tanpa mengharapkan adanya imbalan. Jika pegawai pemerintahan menerima imbalan dari pihak tertentu maka perilaku tersebut merupakan tindakan korupsi dalam bentuk gratifikasi. Dalam rangka menyebarluaskan pesan anti gratifikasi, Inspektorat DIY melakukan sosialisasi pemberantasan korupsi melalui video animasi yang dipublikasi pada channel Youtube Sekretariat Inspektorat DIY. Inspektorat DIY mempublikasi video animasi yang berjudul “Budaya Anti Gratifikasi“ berdurasi 3.01 (3 menit, 1 detik) telah ditonton sebanyak 380 kali dan terdapat video animasi yang berjudul “Perbedaan Hadiah Dengan Gratifikasi Suap“ berdurasi 2.28 (2 menit, 28 detik) telah ditonton kurang lebih 484 kali. Video tersebut ditujukan khususnya bagi pegawai pemerintah supaya dapat menghindari terjadinya pelanggaran gratifikasi.



Gambar 3. 7 Video Budaya Anti Gratifikasi pada Channel Youtube Sekretariat Inspektorat DIY
Sumber: https://www.youtube.com/@sekretariatinspektoratdiy7590

3) Podcast Spotify

PAKSIJI melalui media podcast Spotify MAN 1 Yogyakarta, melakukan penyuluhan anti korupsi. MAN 1 Yogyakarta memiliki program kegiatan penyebaran informasi melalui siaran Podcast. Pada podcast yang dilaksanakan pada 29 Mei 2022, MAN 1 Yogyakarta mengundang PAKSIJI untuk menjadi narasumber. Tema pada podcast tersebut adalah pendidikan anti korupsi "Wujudkan Generasi Muda Anti Korupsi". PAKSIJI menyampaikan pesan bagi para pelajar mengenai strategi atau langkah-langkah yang dapat dilakukan sebagai generasi muda supaya terhindar dari perilaku korupsi. Hal yang dapat dilakukan yaitu seperti, membiasakan bertindak jujur dan disiplin dalam berkehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya yaitu jujur pada saat mengerjakan ujian dan displin dalam waktu. Hal tersebut menjadi upaya untuk dapat menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada generasi muda. Podcast MAN 1 Yogyakarta dengan tema "Wujudkan Generasi Muda Anti Koruspsi" dipublikasikan oleh MAN 1 Yogyakarta di platform Instagram dan Sportify pada bulan Mei 2022 dan berdurasi 39 menit 24 detik.



Gambar 3. 8 Podcast MAN 1 Yogyakarta di Platform Spotify
Sumber:https://open.spotify.com/show/2BSECm8TdJ5ccvDaG3lksL?si=56cfcdafdea24425

4) Talkshow Star Jogja FM

PAKSIJI berkolaborasi dengan Pemeriksa Intelijen Kejati DIY beserta POLDA DIY dalam melakukan penyuluhan anti korupsi kepada masyarakat luas mengenai pemerasan terhadap tindakan pungutan liar. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada 21 Mei 2021 di radio Star Jogja FM dan dihadiri oleh Sekretaris Inspektorat DIY, Asisten Pengawas Kejati DIY, dan pihak Polda DIY. Pesan yang disampaikan adalah masyarakat dihimbau untuk berani dalam melakukan pelaporan jika ditemukan oknum yang melakukan pemerasan yaitu pungutan liar. Hal tersebut perlu dilakukan karena dapat membantu pemerintah dalam melakukan penanganan terhadap kasus pungutan liar (starjogja.com).



Gambar 3. 9 Talkshow Star Jogja FM pada 21 Mei 2021
Sumber: https://www.starjogja.com/2021/05/22/masyarakat-harus-berani-laporkan-pungutan-liar-ke-saber-pungli-diy/

b. Memfasilitasi Kegiatan Komunikasi Komunitas Antikorupsi di Lembaga Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat Luas

1) Inspektorat DIY Memfasilitasi Kegiatan Peluncuran Buku Anti Korupsi

PAKSIJI menyelenggarakan kegiatan Launching Buku Pendidikan Karakter Anti Korupsi sekaligus sebagai acara Seminar Nasional Pendidikan Anti Korupsi. Pada 17 Mei 2023, kegiatan launching buku dan seminar diselenggarakan di Inspektorat DIY dan dihadiri oleh narasumber dari KPK RI. Dalam materi yang disampaikan oleh perwakilan KPK RI menyampaikan terkait dengan kelembagaan, strategi dalam memberantas korupsi, dan perencanaan program yang akan dilakukan KPK di tahun 2023. Diselenggarakannya kegiatan tersebut sekaligus dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional 2023. Seminar Nasional Pendidikan Anti Korupsi dan Launching Buku Pendidikan Karakter Anti Korupsi dilaksanakan menggunakan metode hybrid, dimana kegiatan tersebut dilakukan secara offline di Gedung Inspektorat DIY dan online melalui aplikasi Zoom Meeting.


Harian Jogja

HOME NEWS PEMILU 2024 JOGJAPOLITAN EKBIS OTO-TEKNO WISATA SPORT KEDU

Paksiji Gelar Seminar dan Launching Buku Pendidikan Karakter Anti Korupsi

Gambar 3. 10 Pemberitaan Harian Jogja
Sumber:https://jogjapolitan.harianjogja.com/

Buku Pendidikan Karakter Anti Korupsi – Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila berisi tentang materi pembelajaran anti korupsi bagi siswa Sekolah Dasar. Di dalam buku tersebut terdapat penerapan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dilakukan

siswa-siswi untuk menghindari perilaku buruk yang mengarah pada perbuatan korupsi. Perilaku koruptif yang kerap ditemui pada pelajar adalah mencontek, meninggalkan sesi pembelajaran, dan berperilaku bohong. Dimana hal tersebut merupakan tindakan buruk yang perlu untuk ditinggalkan sejak dini, supaya kelak dapat membiasakan diri untuk selalu berbuat jujur, disiplin, dan berintegritas.



Gambar 3. 11 Buku Pendidikan Karakter Anti Korupsi disusun oleh Dr. Suyadi, M.Pd.I. · Suyitno, S.Pd., M.Pd.
Sumber: https://play.google.com/

Selain melalui buku pendidikan, terdapat buku puisi yang berisikan pesan-pesan mengenai perilaku korupsi. Dalam upaya pemberantasan korupsi, PAKSIJI melakukan pendekatan dengan komunitas swasta yaitu komunitas Asosiasi Penyair Antikorupsi Yes Action (APA YA). Komunitas APA YA merupakan komunitas penyair yang kerap menyuarakan pesan-pesan anti korupsi melalui media puisi dan sajak. Terdapat Buku “Antologi Puisi: Menyuluh Anti Korupsi dengan Puisi“ yang merupakan buku perdana dari komunitas APA YA. Di dalam buku tersebut terdapat kumpulan-kumpulan sajak dan puisi yang berisikan tentang ajakan untuk menghindari perbuatan korupsi.

PAKSIJI dan komunitas APA YA bekerjasama dalam menyelenggarakan kegiatan Soft Launching dan Bedah Buku Antologi Puisi “Menyuluh Antikorupsi dengan Puisi: Mengajari Tanpa Rasa Menggurui”. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Sabtu, 21 Oktober 2023 di Inspektorat DIY. Terdapat tamu undangan yang hadir secara langsung di Inspektorat DIY pada kegiatan Soft Launching dan Bedah Buku tersebut, salah satunya dihadiri oleh Rachel Saraswati Rendra sebagai penyair yang hadir untuk membahas buku Antologi Puisi “Menyuluh Antikorupsi dengan Puisi: Mengajari Tanpa Rasa Menggurui”. Selain diselenggarakan secara offline di gedung Inspektorat DIY, kegiatan tersebut juga dapat dihadiri oleh masyarakat melalui aplikasi Zoom Meeting.



Gambar 3. 12 Pamflet Soft Launching Buku “Antologi Puisi Menyuluh Anti Korupsi dengan Puisi“
Sumber: https://www.instagram.com/pak_siji_diy/

Penulisan dan penerbitan buku PBAK menjadi salah satu strategi komunikasi yang dapat dilakukan. Sehingga lembaga negara maupun sektor swasta perlu saling bekerjasama untuk mendorong efektivitas PBAK. Strategi pemberian fasilitasi pada kegiatan yang berhubungan dengan anti korupsi menjadi langkah penting yang perlu dilakukan. Dukungan pemberian fasilitas tersebut diberikan kepada segala pihak baik secara individu maupun komunitas yang memiliki fokus untuk melakukan pemberantasan korupsi. Dengan adanya pemberian fasilitasi tersebut dapat sebagai aksi nyata yang ditunjukan oleh Inspektorat DIY untuk berupaya melakukan pemberantasan korupsi.

2) Memfasilitasi Kegiatan bagi Kepala Sekolah dan Kepala Tata Usaha SMA dan SMK Se Kabupaten Sleman

Balai Pendidikan Menengah (DIKMEN) Kabupaten Sleman menyelenggarakan kegiatan Workshop Penguatan Manajerial bagi Kepala Sekolah dan Kepala Tata Usaha SMA dan SMK Se Kabupaten Sleman. Tema pada kegiatan Workshop tersebut adalah “Mewujudkan Sekolah Anti Korupsi dengan Penanaman Nilai-nilai Integritas”. PAKSIJI hadir sebagai narasumber untuk menyampaikan materi mengenai integritas pegawai dan regulasi-regulasi yang berlaku pada pengadaan barang dan jasa di lingkungan sekolah. Selain itu, PAKSIJI menyampaikan pesan bagi Kepala Sekolah dan Kepala Tata Usaha SMA dan SMK Se Kabupaten Sleman untuk dapat memahami makna Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Isi yang terdapat pada undang-undang tersebut adalah terkait dengan pengertian, bentuk-bentuk, dan jenis hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Perlunya penanaman wawasan pengetahuan bagi penyelenggara sekolah mengenai tindakan korupsi, supaya menghindari terbukanya

kesempatan untuk melakukan tindakan korupsi yang dapat merugikan sekolah khususnya pada pemberian fasilitas bagi siswa. Kegiatan Workshop “Mewujudkan Sekolah Anti Korupsi dengan Penanaman Nilai-nilai Integritas” diselenggarakan secara langsung di Ruang Balai DIKMEN Kabupaten Sleman pada Senin, 19 September 2023.



Gambar 3. 13 Workshop Balai Dikmen pada 19 September 2023
Sumber: https://baldiksleman.jogjaprov.go.id/

3) Memfasilitasi Kegiatan Penguatan dan Konsolidasi bagi Penyuluh PAKSIJI

PAKSIJI menyelenggarakan kegiatan penguatan dan konsolidasi dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia yang diperingati setiap tanggal 9 Desember. Pada Sabtu, 9 Desember 2023 kegiatan penguatan dan konsolidasi PAKSIJI dilaksanakan di Inspektorat DIY. Kegiatan tersebut dimulai dengan kegiatan apel sebagai kegiatan pembuka dan selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan puisi yang berisikan semangat anti korupsi yang dilakukan oleh para penyuluh anti korupsi. Puisi yang dibacakan pada kegiatan tersebut merupakan puisi karangan penyuluh anti korupsi yang telah dibuat sebelumnya dan yang terdapat pada Buku Antologi Puisi Menyuluh Anti Korupsi Dengan Puisi.

Kegiatan penguatan dan konsolidasi tersebut menjadi ruang bagi para penyuluh anti korupsi untuk dapat saling bertukar pengalaman mengenai aktivitas dalam pencegahan anti korupsi. Dengan adanya kegiatan tersebut maka diharapkan terjalin sinergisitas antar para penyuluh PAKSIJI, sehingga upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.



Gambar 3. 14 Penguatan dan Konsolidasi Pendidikan Anti Korupsi PAKSIJI
Sumber: https://www.instagram.com/pak_siji_diy/

c. Mendorong Pembentukan dan Pengembangan Wahana dan Komunitas Antikorupsi

1) Mengadakan Kegiatan Seminar

PAKSIJI bersama dengan Universitas Ahmad Dahlan berkolaborasi dalam menyelenggarakan kegiatan Seminar Nasional Pendidikan Anti Korupsi yang ditujukan bagi mahasiswa. Tema pada kegiatan tersebut adalah “Masifikasi Nilai-Nilai Antikorupsi Guna Terciptanya Generasi Bebas dari Korupsi”. Kegiatan seminar tersebut dilaksanakan pada tanggal hari Sabtu, 20 Maret 2021 pada pukul 08.00 WIB. Kegiatan seminar “Masifikasi Nilai-Nilai Antikorupsi Guna Terciptanya Generasi Bebas dari Korupsi” dilaksanakan ketika masih dalam masa pandemi covid-19, dimana pada saat itu terdapat peraturan mengenai Physical distancing yaitu masyarakat diperintahkan untuk saling menjaga jarak aman. Berdasarkan hal tersebut, maka kegiatan seminar tidak bisa diselenggarakan secara langsung, melainkan dilaksanakan melalui aplikasi Zoom Meeting. Pada kegiatan seminar tersebut, terdapat sertifikat yang disediakan bagi peserta yang mengikuti kegiatan tersebut.



Gambar 3. 15 Pamflet Seminar Nasional Pendidikan Anti Korupsi
Sumber: https://www.instagram.com/pak_siji_diy/

Pada 11 Desember 2023 PAKSIJI kembali berkolaborasi dengan UAD dalam menyelenggarakan kegiatan “Seminar Anti Korupsi, Implementasi Gerakan Anti Korupsi Bagi Mahasiswa”. Seminar ini dilaksanakan dengan menggunakan metode hybrid, dimana kegiatan “Seminar Anti Korupsi, Implementasi Gerakan Anti Korupsi Bagi Mahasiswa” dilakukan secara offline di ruang Amphitarium, Lt. 9, Kampus 4 Universitas Ahmad Dahlan dan disiarkan secara langsung melalui channel Youtube Universitas Ahmad Dahlan. Pada siaran melalui akun Youtube Universitas Ahmad Dahlan, kegiatan seminar tersebut yang diselenggarakan pada 11 Desember 2023 telah ditonton sebanyak 381 kali. Materi yang disampaikan pada kegiatan tersebut mengenai strategi pemberantasan yang perlu dilakukan yaitu dengan pengimplementasian perbaikan sistem dan penindakan bagi petugas berwajib, pelaksanaan kampanye dan edukasi, serta perlu adanya peran serta dari masyarakat dalam melakukan pemberantasan korupsi.



Gambar 3. 16 Seminar Anti Korupsi di UAD pada 11 Desember 2023
Sumber:https://news.uad.ac.id/terapkan-gerakan-anti-korupsi-bagi-mahasiswa-uad-adakan-seminar-anti-korupsi/

Selain kegiatan seminar yang ditujukan bagi mahasiswa, pada 22 Desember 2023 PAKSIJI berkolaborasi dengan Balai Besar Veteriner Wates (BBVet) Wates untuk menyelenggarakan “Seminar Membangun Budaya Anti Korupsi“. Diadakannya kegiatan Seminar Membangun Budaya Anti Korupsi tersebut bertepatan dengan memperingati Hari Antikorupsi Sedunia 2023 (HAKORDIA). Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan menggunakan metode hybrid. Kegiatan seminar tersebut dapat diikuti secara langsung di Aula Balai Besar Veteriner Wates, Yogyakarta dan juga dapat melalui aplikasi Zoom Meeting. Selain dihadiri oleh pegawai BBVet Wates, kegiatan tersebut juga dihadiri oleh para stakeholder dari penyedia barang dan jasa. Tujuan diselenggarakannya kegiatan tersebut adalah untuk memberikan materi pencegahan anti

korupsi pada sektor Pengadaan Barang dan Jasa, sehingga dapat mengantisipasi terjadinya tindakan korupsi.



Gambar 3. 17 Pelaksanaan Penyuluhan di BBVet Wates pada 22 Desember 2023
Sumber: https://www.instagram.com/pak_siji_diy/

2) Mengoptimalisasi Pengawasan mengenai Anti Korupsi

Dalam pelaksanaan program MCP, Inspektorat DIY melakukan secara rutin kegiatan koordinasi dan sosialisasi setiap triwulan kepada instansi atau perangkat daerah yang terkait pada area intervensi dalam program MCP. Pesan yang disampaikan oleh Inspektorat DIY adalah terkait dengan tujuan dari adanya program MCP yaitu mendorong perangkat daerah supaya mentransformasi nilai dan praktik tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan pedoman MCP KPK. Selain itu Inspektorat DIY menyampaikan mengenai aplikasi Jaga.id, dimana aplikasi tersebut merupakan situs yang dapat diakses oleh pegawai pemerintah daerah untuk mengirimkan laporannya sesuai dengan tujuh fokus area intervensi pada program MCP KPK (kpk.go.id).

> "*Evaluasi atas program capaian MCP KPK dilakukan setiap triwulan, dimana Inspektorat akan mengadakan evaluasi atas capaian pelaporan dari satuan kerja pengampu MCP KPK terkait 7 area intervensi dapat menyerahkan data dukungnya yang nanti akan dilakukan penilaian oleh KPK melalui aplikasi jaga.id*" (Wawancara dengan Bernardinus Norowisnu, S.Kom., M.Hum selaku Kepala Sub Bagian Program dan Monev, 8 Desember 2023).



Gambar 3. 18 Kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi pada Selasa, 5 September 2023
Sumber: Dokumentasi Inspektorat DIY

d. Mengoptimalkan Kualitas dan Kuantitas Partisipasi dengan Sekolah, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Pendidik

1) Penyuluhan bagi Siswa Sekolah Dasar

Dalam melakukan penyuluhan anti korupsi, PAKSIJI menyasar berbagai target audiens salah satunya adalah murid-murid sekolah dasar (SD). Terdapat kegiatan penyuluhan anti korupsi yang telah PAKSIJI lakukan pada murid SD, yaitu di SD Muhammadiyah Domban 2 dan SDN 1 Petir. Pada kegiatan penyuluhan anti korupsi yang dilakukan di SD Muhammadiyah Domban 2, mengusung tema “Pengenalan Pendidikan Anti Korupsi Sejak Dini”. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Selasa, 15 November 2022 dan dihadiri oleh murid SD Muhammadiyah Domban 2. Selain menyampaikan pesan anti korupsi, pada akhir sesi kegiatan terdapat kegiatan deklarasi anti korupsi. Murid SD Muhammadiyah Domban 2 diajak untuk melakukan kegiatan yang seru namun memiliki makna, yaitu dengan melakukan stampel cap telapak tangan pada tembok yang telah ditetapkan sebagai tempat “Deklarasi Anti Korupsi“. Hal tersebut merupakan bentuk keikutsertaan murid dalam mendeklarasikan dirinya untuk dapat terhindar dari perilaku korupsi.

Berbeda dengan kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan di SDN 1 Petir, dimana pada kegiatan tersebut tidak hanya dihadiri oleh murid sekolah saja namun wali murid turut serta dalam mengikuti rangkaian kegiatan penyuluhan anti korupsi. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada 5 Januari 2023 dengan tema “Orang Tua Cemerlang, Anak-anak Gemilang”. Pesan yang disampaikan adalah mengejar kesuksesan tidak hanya dalam hal akademik saja namun memiliki karakter baik menjadi salah satu hal terpenting.



Gambar 3. 19 Kegiatan Penyuluhan di SD Muhammadiyah Domban 2 dan SDN 1 Petir
Sumber:https://www.instagram.com/pak_siji_diy/

2) Penyuluhan bagi Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Penyuluhan anti korupsi yang dilakukan PAKSIJI juga menargetkan pelajar yang berada di jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan penyuluhan bagi pelajar SMA dan SMK supaya para pelajar lebih mengetahui mengenai pengertian, penyebab, dampak, dan sadar dengan peran yang dapat dilakukan oleh para pelajar dalam upaya pemberantasan korupsi. PAKSIJI telah melakukan penyuluhan anti korupsi dibeberapa SMA dan SMK yaitu di SMAN 1 Sleman pada 24 November 2022. Tema pada kegiatan tersebut yaitu “Membangun Nilai-Nilai Integritas Anti Korupsi Berbasis Budaya“. Fokus pesan yang disampaikan terkait dengan penyebaran pesan anti korupsi yang dapat disisipkan diberbagai unsur-unsur budaya, mulai dari budaya tradisional dan budaya kekinian. Cara yang dapat dilakukan seperti, melalui tembang jawa, puisi, lagu, film, dan pantun.

Berbeda dengan tema kegiatan penyuluhan anti korupsi di SMA N 1 Sleman, pada tanggal 13 Juli 2023 SMKN 1 Dlingo melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah/MPLS yang diikuti oleh siswa peserta didik baru. Pada rangkaian kegiatan MPLS tersebut terdapat sesi penyampaian materi untuk dijadikan bekal pengetahuan bagi siswa-siswi yang akan memulai masa pembelajaran sebagai pelajar SMK. Salah satu materi yang diberikan adalah tentang permasalahan korupsi. PAKSIJI hadir pada kegiatan tersebut untuk memberikan penyuluhan anti korupsi tentang "Materi Dasar Anti Korupsi Pengertian Korupsi, Penyebab, Dampak, dan Peran Pelajar dalam Upaya Pemberantasan Korupsi". Peserta yang hadir dalam kegiatan penyuluhan anti korupsi tersebut terdapat sekitar 216 siswa. Pesan yang disampaikan adalah siswa perlu memahami dan meninggalkan kebiasaan buruk yang kerap dilakukan, dimana perilaku seperti menyontek, plagiat, sering terlambat, membolos, dan berbohong, merupakan awal mula perilaku korupsi sering terjadi.



Gambar 3. 20 Kegiatan Penyuluhan pada Pelajar SMA/SMK
Sumber:https://www.instagram.com/pak_siji_diy/

3) Penyuluhan bagi Sekolah Tinggi Multi Media “MMTC“

Sebagai langkah dalam menyebarluaskan pesan anti korupsi, PAKSIJI juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan di perguruan tinggi. Seperti pada kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan secara langsung pada hari Selasa, 26 September 2023 di Ballroom Merapi Hotel Dafam Fortuna Seturan Yogyakarta. Sekolah Tinggi Multi Media “MMTC“ berkolaborasi dengan PAKSIJI dalam menyelenggarakan sosialisasi anti korupsi dan anti gratifikasi. Sosialisasi tersebut diselenggarakan dengan tema “Internalisasi Nilai Integritas Anti Korupsi dan Anti Gratifikasi” dan dihadiri oleh kalangan dosen, karyawan dan manajemen kampus, serta perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa. Diadakannya kegiatan sosialisasi tersebut sebagai bentuk upaya menciptakan lingkungan kampus yang berintegritas dan bebas dari korupsi.

Pada Selasa, 8 November 2023, Sekolah Tinggi Multi Media “MMTC“ dan PAKSIJI kembali bekerjasama dalam menggelar sosialisasi anti korupsi dan anti gratifikasi. Pada kegiatan ini yang menjadi tema sosialisasi adalah “Internalisasi Budaya yang Etis, Antikorupi dan Netralitas ASN” dalam rangka mendukung layanan pendidikan di MMTC. Kegiatan ini ditujukan bagi dosen, karyawan dan manajemen kampus, serta terdapat perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STMM MMTC.



Gambar 3. 21 Kegiatan Bekerjasama dengan STMM MMTC Yogyakarta
Sumber:https://www.instagram.com/pak_siji_diy/

e. Mengoptimalkan Kesadaran akan Kejujuran Diri Terhadap Nilai-Nilai Anti Korupsi

1) Melalui Media Cetak

Dalam upaya mengoptimalkan kesadaran bagi masyarakat, Inspektorat DIY menggunakan media cetak berupa banner. Penempatan banner tersebut berada di tempat-tempat strategis di lingkungan Inspektorat DIY, seperti di depan Gedung maupun di lobby Inspektorat DIY, yang mudah terlihat dan terbaca oleh masyarakat umum. Banner tersebut berisikan pesan mengenai anti gratifikasi yang dapat ditujukan kepada masyarakat dan khususnya kepada pegawai baik di Inspektorat DIY maupun pegawai dari instansi lain. Banner merupakan salah satu bentuk media cetak yang umum digunakan untuk menampilkan suatu pesan kepada khalayak. Penempatan banner tersebut berada di tempat-tempat strategis di lingkungan Inspektorat DIY,seperti di depan Gedung maupun di lobby gedung inspektorat DIY.



Gambar 3. 22 Banner Anti Gratifikasi di Inspektorat DIY

2) Sosialisasi

Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY yang kini sejak 2022 berubah nama menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP DIY) merupakan salah satu instansi yang termasuk ke dalam tujuh fokus area intervensi pada program MCP. Pada tanggal 23-26 Maret 2021 diselenggarakan kegiatan “Evaluasi Pengawasan dan Pelaporan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY“, dimana pada kegiatan tersebut Inspektorat DIY melakukan sosialisasi dan koordinasi capaian target MCP yang dilakukan oleh DPMPTSP DIY. Pada kegiatan tersebut fokus pembahasan yang disampaikan oleh Inspektorat DIY kepada DPMPTSP DIY mengenai area intervensi yang menjadi titik rawan terjadinya korupsi pada program MCP khususnya pada area perizinan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (PTSP). Melalui sosialisasi yang dilaksanakan secara tatap muka, para pegawai DPMPTSP DIY dapat secara langsung melakukan tanya jawab supaya dapat menyatukan visi pemberantasan korupsi melalui program MCP.



Gambar 3. 23 Kegiatan Inspektorat DIY pada Sosialisasi dan Koordinasi MCP tanggal 23-26 Maret 2021
Sumber: https://www.instagram.com/pak_siji_diy/

Selain itu, pada 7 Desember 2023, PAKSIJI menghadiri Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Dasar sebagai narasumber untuk menyampaikan pesan penyuluhan anti korupsi. Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Dasar dilaksanakan selama lima hari, dimana dalam pelatihan tersebut terdapat penyampaian materi mengenai korupsi. Materi yang disampaikan terkait dengan definisi korupsi, ciri-ciri korupsi, dan dampaknya. Peserta yang mengikuti pelatihan tersebut berasal dari berbagai profesi dalam bidang kesehatan seperti, dokter, bidan, perawat, dan nutrisionis dengan jumlah keseluruhan terdapat 30 peserta pelatihan. Kegiatan tersebut diselenggarakan secara langsung di Rumah Sakit Umum Daerah Sleman.



Gambar 3. 24 Kegiatan Fasyankes di RSUD Sleman
Sumber: https://www.instagram.com/pak_siji_diy/

f. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat maupun Komunitas Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Melalui Whistleblower

Whistleblower merupakan bagian penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Peran dari Whistleblower yaitu sebagai saksi atau pihak yang

melaporkan atas adanya temuan dari tindak pidana korupsi yang ditemuinya. Bentuk laporan yang diberikan harus disertai dengan adanya informasi dan bukti dukung. Kerahasiaan identitas pelapor akan dirahasiakan untuk menjaga keamanan atas pemberian informasi laporan yang telah dilakukan. Peran dari Whistleblower dalam upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan oleh pihak internal dalam suatu instansi. Jika hal tersebut dilakukan maka diharapkan penyimpangan dalam suatu internal lembaga dapat terhindar dari adanya perilaku korupsi.

Pada hari Selasa, 25 Juli 2023 terdapat kegiatan sosialisasi *Whistle Blowing System* (WBS) dan Anti Korupsi yang dilaksanakan secara online melalui aplikasi Zoom Meeting. Peserta sosialisasi tersebut adalah pegawai Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) DIY. PAKSIJI hadir sebagai narasumber untuk menyampaikan materi mengenai layanan pengaduan WBS yang dapat dilakukan oleh pegawai dan masyarakat untuk melaporkan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai pemerintahan. Terdapat situs online yang dapat diakses oleh masyarakat untuk melakukan pelaporan terhadap adanya bentuk kecurangan dalam pelayanan publik yang ditemukan oleh masyarakat. Terdapat situs website lapor.jogjaprov.go.id, dimana pelapor dapat menuliskan aduannya melalui website tersebut, kemudian proses selanjutnya Inspektorat DIY selaku instansi yang memiliki peran dan fungsi dalam hal pengawasan menindaklanjuti atas aduan tersebut dan pelapor dapat memantau perkembangan atas aduan yang telah dilakukan.



Gambar 3. 25 Kegiatan Fasyankes di RSUD Sleman
Sumber: https://www.instagram.com/pak_siji_diy/



Gambar 3. 26 website lapor.jogjaprov.go.id
Sumber: https://lapor.jogjaprov.go.id/

4. Faktor Pendukung dan Penghambat

Terdapat hal-hal yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat pada upaya pemberantasan korupsi melalui program PAK dan MCP di Inspektorat DIY. Faktor pendukung utama adalah kemajuan teknologi yang semakin canggih memungkinkan Inspektorat DIY untuk lebih efektif dalam melakukan koordinasi dan sosialisasi mengenai program PAK dan MCP kepada instansi dan masyarakat. Dengan adanya teknologi saat ini, dapat mendukung dan mempermudah Inspektorat DIY dalam melakukan pemantauan dan pengawasan, contohnya pada penggunaan aplikasi jaga.id dan situs website lapor.jogjaprov.go.id. Selain itu sinergisitas antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi juga menjadi faktor pendukung. Semakin banyak unsur masyarakat yang memiliki minat ketertarikan terhadap isu korupsi, sehingga semakin memperluas penyebaran pesan anti korupsi kepada berbagai pihak.

Sedangkan faktor penghambat Inspektorat DIY dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi melalui program PAK dan MCP adalah adanya para pimpinan tinggi di pemerintahan yang terlibat kasus korupsi. Hal tersebut mengakibatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penanganan korupsi yang dilakukan pemerintah menjadi menurun. Selain itu, adanya beragam kegiatan lain yang perlu ditangani oleh Inspektorat DIY mengakibatkan fokus terhadap program PAK dan MCP menjadi terbagi.

B. Pembahasan

Pada bagian ini, peneliti menganalisis hasil-hasil yang diperoleh berdasarkan dari temuan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya. Peneliti akan menjabarkan dengan metode deskriptif, sehingga dapat memberikan penjelasan mendalam mengenai perencanaan dan strategi komunikasi yang dilakukan Inspektorat DIY dalam upaya pemberantasan korupsi melalui program PAK dan MCP.

1. Pentingnya Perencanaan Komunikasi

Inspektorat DIY memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan dan pembinaan pada kegiatan pemerintahan di wilayah provinsi DIY. Melalui surat KPK Nomor B/1404/DKM.00.04/1017/03/2020, KPK bekerja sama dengan Inspektorat DIY untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sehingga perlunya suatu perencanaan komunikasi dalam rangka upaya pemberantasan korupsi melalui program PAK dan MCP.

Dalam melaksanakan program PAK dan MCP, Inspektorat DIY menyusun perencanaan komunikasi terlebih dahulu. Hal tersebut dilakukan supaya dapat terhindar dari terjadinya hambatan dalam proses pertukaran informasi Cangara (2013: 33). Selain itu perencanaan komunikasi sebagai pedoman untuk mempersiapkan antisipasi dari segala kemungkinan yang akan terjadi.

Berkaitan dengan hal tersebut menurut Widjajanto (2013: 4) dalam perencanaan terdapat pengambilan keputusan dan tindakan yang perlu ditentukan. Keputusan atau tindakan yang telah ditentukan mendasar pada perencanaan yang disusun. Inspektorat DIY melaksanakan program PAK dan MCP sesuai dengan perencanaan yang disusun sebelumnya. Namun berdasarkan temuan penelitian, untuk mengantisipasi apabila pada pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat, Inspektorat DIY telah mempersiapkan perencanaan cadangan. Hal tersebut sesuai dengan syarat perencanaan menurut Cangara, dimana suatu perencanaan yang baik harus memperhitungkan kemungkinan yang dapat terjadi dan menghambat dalam pelaksanaanya Cangara (2013).

Selain itu Menurut Cangara (2013) lima syarat perencanaan yang baik, yaitu faktual dan realistis, logis dan rasional, fleksibel, komitmen, dan komprehensif. Perencanaan yang disusun Inspektorat DIY berdasarkan dari fakta dan realita yang ada. Program PAK dan MCP merupakan program KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi. Trisula strategi dalam pemberantasan korupsi yaitu penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Program PAK sebagai penerapan sula pendidikan yaitu melalui penyuluhan anti korupsi yang ditujukan untuk masyarakat luas, sedangkan pada program MCP berfokus pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menerapkan sula pencegahan bagi pegawai pemerintah daerah.

Dalam menetapkan media sebagai sarana penyampaian pesan merupakan hal penting, karena media memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu disesuaikan (Puspitasari & Afifi, 2022). Berdasarkan dari temuan penelitian, dalam menentukan target sasaran, pemilihan media, dan penetapan tujuan Inspektorat DIY melakukan riset melalui monitoring dengan melihat perkembangan pada isu yang terjadi. Pada pemilihan media, dilakukannya riset berdasarkan manfaat dan karakteristik dari masing-masing media. Sehingga penetapan media dapat sesuai juga dengan karakteristik target sasaran.

Target sasaran di setiap kegiatan penyuluhan berbeda-beda. Tidak hanya pegawai pemerintahan saja, namun juga dari kalangan dosen, pelajar, mahasiswa, maupun masyarakat menyesuaikan dengan undangan permintaan,

keadaan, atau melihat dari isu-isu yang sedang berkembang di masyarakat. Pendekatan tersebut dilakukan untuk dapat mencakup berbagai kalangan masyarakat, mengingat tindakan korupsi dapat terjadi kapan dan dimana saja karena adanya kesempatan.

Pada proses komunikasi, mengenali target sasaran menjadi langkah yang perlu diperhatikan, karena untuk mencapai target yang diinginkan komunikator dan khalayak tidak hanya saling berinteraksi, namun juga saling memberikan pengaruh (Puspitasari & Afifi, 2022). Menurut Cangara (2013: 137) pengelompokan karakteristik dapat dibedakan berdasarkan dari segmentasi sosiodemografi, psikologi, dan perilaku. Pengelompokan berdasarkan segmentasi sosiodemografi, psikologi, dan perilaku, tidak semuanya diterapkan oleh Inspektorat DIY. Target ditetapkan berdasarkan dari segmentasi sosiodemografi. Pengelompokan usia, pekerjaan, dan pendidikan menjadi faktor utama dalam penetapan target sasaran.

Menyebarluaskan pesan anti korupsi kepada khalayak, berkaitan dengan terjadinya proses komunikasi. Sesuai dengan teori menurut Laswell (dalam Sanityastuti, 2020) bahwa media komunikasi dapat mempermudah dan mempercepat penyampaian informasi kepada khalayak. Inspektorat DIY menggunakan berbagai jenis media yakni media cetak meliputi (banner dan buku), media elektronik (media lagu, televisi, dan radio), media internet (media sosial meliputi Instagram dan Youtube), dan media luar jaringan atau secara langsung. Hal tersebut selaras dengan jenis media komunikasi menurut Cangara (2013) dan penggunaan media-media tersebut bertujuan untuk dapat menjangkau berbagai kalangan masyarakat.

2. Analisis Strategi Komunikasi

Strategi komunikasi adalah kiat atau cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan sesuai dengan keadaan situasi dan kondisi Effendy (2009: 32). Tujuan Inspektorat DIY melaksanakan program PAK dan MCP yaitu sebagai bentuk upaya pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintah daerah maupun berbagai kalangan masyarakat. Sehingga diharapkan pesan anti korupsi dapat dipahami dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan utama yang menjadi inti aktivitas komunikasi menurut Effendy (2009: 32) yang dilakukan Inspektorat DIY dalam upaya pemberantasan korupsi melalui program PAK dan MCP, yaitu:

a. To secure understanding

Komunikator diharuskan untuk dapat meyakinkan komunikan bahwa pesan yang disampaikan sudah dapat dipahami Effendy (2009: 32). Inspektorat DIY

dalam menyampaikan pesan baik pada Program PAK maupun MCP, belum menerapkan suatu cara yang dilakukan untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan telah dipahami oleh *audiens*. Sehingga tidak dapat diketahui secara pasti apakah seluruh *audiens* telah sepenuhnya memahami pesan yang disampaikan oleh narasumber. Inspektorat DIY tidak melakukan pre test maupun post test untuk mengukur seberapa dalam pemahaman *audiens* terhadap materi pesan yang disampaikan. Hal yang telah dilakukan oleh Inspektorat DIY yaitu, memberikan kesempatan kepada *audiens* untuk bertanya kepada narasumber pada akhir sesi kegiatan terkait dengan materi yang telah disampaikan.

b. To establish acceptance

Setelah menyampaikan pesan penyuluhan anti korupsi kepada *audiens*, Inspektorat DIY secara terbuka memberikan pendampingan dan pembinaan yaitu dengan membuka kesempatan untuk berdiskusi bersama dan berkonsultasi melalui sekretariat Inspektorat DIY. Kesempatan berdiskusi bersama perlu dilakukan sebagai bentuk pendampingan dan pembinaan yang diberikan Inspektorat DIY kepada audiens yang memiliki minat lebih untuk mendalami isu-isu korupsi dan tertarik untuk ikut serta melakukan pemberantasan korupsi. Dengan begitu, audiens tersebut diharapkan dapat semakin memiliki pemahaman lebih terkait dengan perilaku korupsi.

Inspektorat DIY selaku koordinator pada program MCP di wilayah Pemerintah Provinsi DIY bertugas untuk melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada perangkat daerah atau instansi terkait dengan tujuh area intervensi sesuai dengan pedoman MCP KPK. Setelah penyampaian pesan, Inspektorat DIY memberikan pendampingan dan pembinaan dalam bentuk membuka kesempatan bagi perangkat daerah/ instansi untuk dapat berkonsultasi baik secara langsung atau menggunakan media lain misalnya melalui telepon dan Whatsapp Inspektorat DIY. Dengan demikian komunikan mendapatkan informasi secara lebih jelas dari pihak yang kompeten.

c. To motivate action

Dengan dilaksanakannya kegiatan penyuluhan anti korupsi, diharapkan komunikan atau peserta penyuluhan anti korupsi dapat tergerak dan termotivasi untuk ikut serta mengikuti sertifikasi PAK, kemudian turut menyebarluaskan pesan anti korupsi. Kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, media, dan masyarakat, sangat penting untuk upaya komunikasi dan respons yang efektif (Nahak & Afifi, 2023). Perlu adanya sinergisitas antara pemerintah dan masyarakat dalam melakukan

penyuluhan anti korupsi. Sehingga target capaian yang diharapkan Inspektorat DIY dapat tercapai yaitu, pesan anti korupsi dapat tersebar luas kepada masyarakat dan semakin banyak masyarakat yang lebih sadar terhadap dampak dari adanya perilaku korupsi. Pada program MCP kegiatan sosialisasi dan koordinasi yang dilakukan Inspektorat DIY, diharapkan dapat meningkatkan semangat integritas dan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintah yang baik, bebas dari adanya perilaku korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi DIY. Sehingga dapat berpengaruh pada pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

Dalam menyampaikan pesan pada pelaksanaan program PAK dan MCP, Inspektorat DIY selalu menekankan pada target capaian yang ingin dicapai yaitu terlaksananya sosialisasi penyuluhan anti korupsi dan penyebaran pesan anti korupsi dapat menjangkau ke seluruh masyarakat dan pegawai di instansi Pemerintah Provinsi DIY. Selain itu yang menjadi target capaian Inspektorat DIY adalah adanya peran serta masyarakat dalam menyebarkan pesan anti korupsi di lingkungan sekitar sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Pada program MCP, target capaiannya adalah tercipta tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan tujuh area intervensi yang telah ditetapkan pada pedoman MCP. Inspektorat DIY selaku *leading sector*/kooordinator bertugas menyampaikan pesan antikorupsi kepada kepada pegawai di wilayah Pemerintah Provinsi DIY. Hal tersebut bertujuan untuk mengingatkan kembali kepada pegawai pemerintah agar dapat mengimplementasikan kebijakan antikorupsi di daerah. Sehingga pemerintah dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas baik.

Berdasarkan dari target capaian tersebut, Inspektorat DIY dalam melaksanakan program PAK dan MCP bertujuan untuk memberikan dampak pada pengetahuan, sikap, dan perilaku komunikan. Menurut Cangara (2007:165), tujuan dari adanya kegiatan komunikasi adalah menyampaikan pesan kepada komunikan dan dapat memberikan pengaruh yang berdampak pada *knowledge* (pengetahuan), *behavior* (sikap), dan *attitude* (perilaku) komunikan.

Selain itu, penyampaian materi yang dilakukan bertujuan untuk memberikan informasi dasar (*announce*) dan pemberian pengetahuan (*educating)* mengenai korupsi kepada setiap target *audiens*, hal itu selaras dengan tujuan strategi komunikasi menurut Liliweri (2011: 248). Selanjutnya, diharapkan dengan disampaikannya materi tentang informasi anti korupsi tersebut dapat memotivasi (*motivating*) *audiens* supaya menghindari perbuatan korupsi. Pesan yang disampaikan, disesuaikan dengan profesi dari masing-masing *audiens*, sehingga

dapat lebih relevan dengan kompetensi *audiens*. Seperti pada penyuluhan anti korupsi yang disampaikan kepada pelajar berbeda dengan penyampaian pesan anti korupsi kepada pegawai.

Berdasarkan dari temuan penelitian, penyampaian pesan anti korupsi menggunakan cara-cara yang dapat menarik minat siswa terhadap isu korupsi. Seperti pada kegiatan yang dilakukan di SD Muhammadiyah Domban 2, dimana siswa diajak untuk melakukan stampel cap telapak tangan pada tembok yang telah disediakan sebagai tempat "Deklarasi Anti Korupsi". Hal tersebut merupakan bentuk keikutsertaan murid dalam mendeklarasikan dirinya untuk dapat terhindar dari perilaku korupsi. Sedangkan penyampaian pesan anti korupsi yang disampaikan kepada pegawai pemerintahan akan lebih spesifik dan terfokus. Sehingga memungkinkan pesan yang disampaikan dapat memperkuat pemahaman serta komitmen terhadap integritas para pegawai.

3. Analisis SWOT

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis menggunakan teknik SWOT. Model analisis SWOT dapat sebagai alat untuk menganalisis strategi institusi yang efektif dan efisien (Fatimah, 2020). Faktor dasar analisis yang termuat pada model SWOT adalah strength/kekuatan, weakness/kelemahan, opportunity/peluang, serta treats/ancaman.

Tabel 3.2 Analisis SWOT

Analisis	**Strategi Komunikasi Inspektorat DIY dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Melalui Program PAK dan MCP**
Strength (Kekuatan)	1. Pemanfaatan beragam jenis media dalam melaksanakan program PAK dan MCP 2. Komunikator yang telah bersertifikat Penyuluh anti korupsi dari lembaga *Anti Corruption Learning Center* (ACLC) KPK 3. Penyampaian pesan anti korupsi kerap dilaksanakan secara langsung
Weakness (Kelemahan)	1. Konten instagram kurang menarik, dimana dokumentasi kegiatan yang dipublikasikan melalui Instagram terlihat terlalu sederhana 2. Dalam pelaksanaan sosialisasi, komunikator tidak memastikan bahwa pesan yang disampaikan telah dipahami oleh komunikan
Opportunity (Peluang)	1. Adanya dukungan dari komunitas dalam pelaksanaan program PAK 2. Adanya hubungan baik antara Inspektorat DIY dengan instansi di wilayah Provinsi DIY
Treats (Ancaman)	1. Masyarakat yang memiliki pandangan negatif kepada pemerintah, dikarenakan masih ditemukan adanya tindak pidana korupsi di lembaga KPK

Tabel 3.3 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat berdasarkan Analisis SWOT

Faktor Pendukung (SO)	Faktor Penghambat (WT)
1. Inspektorat DIY memanfaatkan beragam jenis media sehingga dapat menjangkau berbagai khalayak untuk dapat ikut serta pada pelaksanaan program PAK dan MCP 2. Para penyuluh anti korupsi yang telah mendapatkan sertifikasi dari ACLC KPK dapat menambah kepercayaan dan kredibilitas sebagai komunikator dalam menyampaikan pesan anti korupsi 3. Strategi penyampaian pesan anti korupsi yang dilakukan secara langsung, dapat meningkatkan interaksi langsung antara komunikan dengan *audiens*. Sehingga memungkinkan pesan yang disampaikan dapat lebih persuasif 4. Hubungan yang terjalin baik antara Inspektorat DIY dengan instansi di wilayah Provinsi DIY dapat memberikan dukungan, sumber daya, dan akses yang lebih baik dalam melaksanakan program PAK dan MCP	1. Penyampaian pesan anti korupsi dan dokumentasi kegiatan yang dilakukan melalui media Instagram terlihat terlalu sederhana dan menjadi kurang menarik. Konten yang kurang menarik dapat mempengaruhi minat masyarakat untuk mengikuti kegiatan program pemberantasan korupsi 2. Tidak adanya suatu cara yang dilakukan komunikator untuk memastikan bahwa komunikan telah memahami isi pesan yang disampaikan dapat berpengaruh pada evaluasi pelaksanaan untuk program selanjutnya. Sehingga peningkatan yang seharusnya dapat dilakukan menjadi tidak dapat dimaksimalkan 3. Kasus tindak pidana korupsi yang masih terjadi di lembaga KPK, dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap upaya pembarantasan korupsi yang dilakukan

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, tentang strategi komunikasi Inspektorat DIY dalam upaya pemberantasan korupsi melalui program PAK dan MCP dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Inspektorat DIY menyusun perencanaan terlebih dahulu dalam melaksanakan program PAK dan MCP. Perencanaan yang disusun oleh Inspektorat DIY bertujuan untuk memastikan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan program PAK dan MCP dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan dan untuk menghindari terjadinya hambatan pada proses komunikasi. Perencanaan komunikasi yang dibuat Inspektorat DIY antara lain berisi tentang penetapan target sasaran, kata kunci pesan, pemilihan komunikator, menentukan jenis media, penetapan waktu kegiatan, dan evaluasi program.
2. Dalam upaya pemberantasan korupsi di wilayah provinsi DIY, Inspektorat DIY menetapkan target sasaran dari berbagai kalangan, mulai dari kalangan dosen, pegawai, pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat umum. Pada program PAK penyampaian pesan anti korupsi ditujukan kepada masyarakat luas dan pada program MCP berfokus pada seluruh pegawai pemerintah daerah sesuai dengan pedoman MCP.
3. Komunikator pada kegiatan penyuluhan anti korupsi telah bersertifikasi nasional, hal tersebut dapat menunjukan kredibilitas komunikator dalam menyampaikan pesan anti korupsi. Selain itu, penggunaan kata kunci pesan atau jargon dalam menyampaikan pesan anti korupsi sebagai upaya Inspektorat DIY untuk mempermudah komunikan dalam menerima pesan.
4. Dalam rangka upaya pemberantasan korupsi melalui program PAK dan MCP, penggunaan media yang dilakukan oleh Inspektorat DIY cukup beragam. Penyampaian pesan anti korupsi dilakukan secara tatap muka dan juga dengan menggunakan pemanfaatan media lainnya, seperti banner, buku, lagu, radio, dan media sosial. Media sosial yang digunakan adalah instagram dan youtube, yang berguna sebagai sarana yang efektif dan mudah bagi masyarakat untuk mengakses informasi.

5. Inspektorat DIY secara terbuka memberikan pendampingan dan pembinaan untuk dapat berdiskusi dan konsultasi melalui Sekretariat Inspektorat DIY untuk membahas lebih lanjut mengenai isu dan permasalahan korupsi. Selain itu, pada pelaksanaan sosialisasi terdapat sesi tanya jawab yang diberikan kepada a*udiens* untuk dapat menanyakan perihal dengan materi yang telah disampaikan oleh narasumber.

B. Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa terdapat keterbatasan pada proses penyusunan penelitian ini. Keterbatasan yang ada pada penelitian ini yaitu pembahasan yang peneliti analisis hanya berfokus pada upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan Inspektorat DIY melalui program PAK dan MCP. Sehingga tidak mencakup informasi untuk dapat mengetahui lebih lanjut mengenai upaya lain yang dilakukan Inspektorat DIY dalam memberantas korupsi. Atas ketidaksempurnaan yang ada dalam penelitian ini, diharapkan selanjutnya dapat dilakukan penelitian yang membahas mengenai berbagai strategi lain yang dilakukan oleh Inspektorat DIY dalam upaya memberantas korupsi.

C. Saran

1. **Bagi Inspektorat DIY**

   Inspektorat DIY sebagai instansi pemerintah yang menjadi bagian dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan di tingkat pemerintahan DIY. Pengawasan yang dilakukan termasuk pada pencegahan tindak pidana korupsi yang terjadi di Pemerintah Provinsi DIY. Pelaksanaan tugas pengawasan terutama pada upaya pencegahan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan kinerjanya. Salah satunya dengan cara, memaksimalkan konten pada media sosial Instagram agar dibuat lebih menarik, sehingga berbagai kalangan masyarakat dapat menikmati dan lebih memahami isi pesan yang disampaikan.

2. **Bagi Peneliti Selanjutnya**

   Pada penelitian ini perlu adanya pengembangan yang membahas lebih luas dan spesifik mengenai strategi lain yang dapat dilakukan dalam upaya pemberantasan korupsi. Tidak hanya pada tingkat pemerintah daerah, namun juga dapat dilakukan pada pemerintah pusat. Diharapkan strategi komunikasi yang dilakukan lebih beragam dan bervariatif. Sehingga dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi penelitian mendatang yang serupa dengan penelitian ini dan sebagai bahan penambah wawasan bagi pembaca.

Daftar Pustaka

Sumber Buku

Cangara, H. (2007). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Cangara, H. (2013). *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Jaya, I. M. L. M. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta: Quadrant.

Liliweri, A. (2011). *Komunikasi Serba Ada Serba Makna.* Jakarta: Kencana.

Mulyana, D. (2004). Komunikasi Efektif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Moleong, L. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Orina, J. O. (2014). A study of anti-corruption communication planning by state anti-corruption agencies in Kenya: A case study of the ethics and anti-corruption commission (Doctoral dissertation).

Rosidah, L., A., & Respati, W. (2013). Strategi Komunikasi Pemasaran Terpadu Kampanye Anti Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia.

Subarjono, T., *et al.* (2012). *Cetak Biru Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi*. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Direktorat Komunikasi Publik.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R &. D*. Bandung: Alfabeta.

Suryadi, E. (2018). *Strategi Komunikasi: Sebuah Analisis Teori Dan Praktis di Era Global.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Effendy, O. U. (2009). *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Widjajanto, K. (2013). *Perencanaan Komunikasi Konsep dan Aplikasi*. Ultimus. https://www.researchgate.net/publication/348486279_Perencanaan_Komunikasi_Konsep_dan_Aplikasi.

Sumber Jurnal

Nahak, F. M., & Afifi, S. (2023). Empowering Communities through Health Communication Strategies during the Covid-19 Pandemic: A Comparative Study of India and Indonesia. Iconish, 1(2023). https://doi.org/10.20885/iconish.vol1.art18

Sheryazdanova, G., & Butterfield, J. (2017). E-government as an anti-corruption strategy in Kazakhstan. *Journal of Information Technology & Politics*, 14(1), 83-94.

Soldatenko, I. (2022). COMMUNICATION BETWEEN THE GOVERNMENT AND THE PUBLIC AS A FACTOR IN LOWERING THE RISK OF CORRUPTION.

Puspitasari, S. A., & Afifi, S. (2022). Analisis Strategi Komunikasi Krisis Klinik Kesehatan Gigi di Masa Pandemi COVID-19. Jurnal Mahasiswa Komunikasi Cantrik, 2(1). http://dx.doi.org/10.20885/komunikasi.vol11.iss1.art1

Sumber Skripsi

Gunawan, I. (2010). Strategi Komunikasi Majelis Ulama Indonesia dalam Mensosialisasikan Fatwa Haram Korupsi Kepada Umat Islam Indonesia.

Kumaralalitya, R. S. (2022). Strategi Media Relations Humas Pemda DIY dalam Penanganan Kasus Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta

Sulistiyaningsih. (2019). Strategi Komunikasi Direktorat Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dalam Mensosialisasikan Pengendalian Gratifikasi.

Sumber *Website*

Aclc.kpk.go.id. 2022. Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi Tentang Sertifikasi. https://aclc.kpk.go.id/program/sertifikasi/sertifikasi-penyuluh-antikorupsi/tentang

Aclc.kpk.go.id. 2022. Trisula Strategi Pemberantasan Korupsi KPK untuk Visi Indonesia Bebas dari Korupsi. https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220511-trisula-strategi-pemberantasan-korupsi-kpk-untuk-visi-indonesia-bebas-dari-korupsi

Beritabernas.com. 2023. Inspektorat DIY Resmikan Forum Paksiji. https://beritabernas.com/inspektorat-diy-resmikan-forum-paksiji/

Goodstats.id. 2022. Kasus Korupsi di Indonesia Masih Tinggi, Apa Penyebabnya? https://goodstats.id/article/kasus-korupsi-di-indonesia-masih-tinggi-apa-penyebabnya-7wC6a

Merdeka.com. 2022, Januari 27. Mengupas Program Monitoring Center Prevention, Pencegahan Korupsi Ala Ketua KPK Firli. https://www.merdeka.com/peristiwa/mengupas-program-monitoring-center-prevention-pencegahan-korupsi-ala-ketua-kpk-firli.html

Purwasuka.suara.com. 2022, Agustus 6. Kupas Tuntas Program Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK. https://purwasuka.suara.com/read/2022/08/06/094440/kupas-tuntas-program-monitoring-center-for-prevention-mcp-kpk

Tempo.co. 2023, Januari 31. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2022 Melorot 4 Poin, TII: Drastis Sejak Reformasi. https://nasional.tempo.co/read/1686168/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-pada-2022-melorot-4-poin-tii-drastis-sejak-reformasi

Sumber Lainnya

Sanityastuti, M. S. (2020). Medium (Channel) Komunikasi. [Presentasi PowerPoint]. Diakses dari https://drive.google.com/file/d/151i8A2oDlgpFleOCyBGJJSieTfcxTuts/view

LAMPIRAN
DRAFT WAWANCARA/ INTERVIEW GUIDE

JUDUL: STRATEGI KOMUNIKASI INSPEKTORAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI (Studi pada Program Penyuluh Anti Korupsi (PAK) dan Monitoring Center For Prevention (MCP))

Oleh: Fadila Agvina (20321234)

Gambaran umum Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

1. Apa dasar pembentukan Inspektorat DIY?
2. Apa visi dan misi yang ingin dicapai dari Inspektorat DIY?
3. Bagaimana struktur organisasi dalam Inspektorat DIY?
4. Apa tugas dan fungsi pokok dari Inspektorat DIY?
5. Apa saja yang menjadi area cakupan ketugasan dari Inspektorat DIY?

Poin Utama	Penjabaran Teori	Pertanyaan
Tiga Karakteristik dalam perencanaan (Widjajanto, 2013)	a. Berhubungan dengan masa yang akan datang b. Serangkaian tindakan yang diambil oleh perencana di masa yang akan datang c. Mengidentifikasi pribadi dan organisasi menjadi unsur penting dalam perencanaan	A1. Apakah Inspektorat DIY membuat perencanaan terlebih dahulu sebelum tahap pelaksanaan? B1. Apakah pelaksanaan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan? C1. Dalam menyusun perencanaan apakah Inspektorat DIY terlebih dahulu melakukan identifikasi terhadap masyarakat dan organisasi yang akan menjadi target?
Lima syarat perencanaan yang baik (Cangara, 2013)	a. Faktual dan realistis (Suatu perencanaan harus dibuat berdasarkan fakta serta dapat diimplementasikan)	A1. Pada perencanaan yang dibuat apakah menyesuaikan dengan realita yang ada di masyarakat?

	b. Logis dan rasional (Perencanaan yang disusun harus sesuai logika dan dapat dicapai) c. Fleksibel (Penyusunan perencanaan harus memperhitungan kemungkinan yang dapat terjadi dan menghambat pelaksanaanya) d. Komitmen (Semua pihak yang terlibat dalam perencanaan harus bekerja dengan penuh tanggung jawab sesuai rencana yang disusun) e. Komprehensif atau menyeluruh (Perencanaan harus disusun dengan mempertimbangkan bidang-bidang terkait lainnya sehingga dalam proses pelaksanaannya dapat berjalan secara sinergis dan dinamis)	B1. Apakah terdapat cara atau pedoman yang digunakan agar perencanaan yang disusun dapat terlaksana? C1. Dalam menyusun perencanaan apakah Inspektorat DIY mempersiapkan antisipasi untuk segala kemungkinan yang akan terjadi? D1. Apakah terdapat penyataan secara formal terkait dengan komitmen setiap pihak yang terlibat? E1. Siapa saja pihak yang menyusun perencanaan?
Dokumen tertulis dalam perencanaan komunikasi (Cangara, 2013)	a. Apa yang ingin dicapai b. Alasan menginginkan adanya hasil yang diperoleh	A1. Apa yang menjadi target capaian Inspektorat DIY? B1. Apa yang melatarbelakangi pelaksanaan program tersebut?

	c. Siapa yang menjadi target sasarannya	C1. Siapa yang menjadi target sasaran Inspektorat DIY?
	d. Kata kunci pesan apa yang digunakan	D1. Apakah terdapat kata kunci pada pesan yang akan disampaikan?
	e.Pemilihan komunikator dan bagaimana cara menentukannya	E1. Bagaimana Inspektorat DIY menentukan komunikator atau narasumber yang akan menyampaikan pesan? Bagaimana cara menentukannya?
	f. Cara yang digunakan dalam mencapai tujuan	F1. Cara apa saja yang akan digunakan Inspektorat DIY?
	g. Jenis media apa untuk menyampaikan pesan	G1. Apa jenis media yang digunakan Inspektorat DIY dalam menyampaikan pesan? Mengapa memilih media tersebut?
	h. Waktu untuk menyampaikan pesan	H1. Bagaimana Inspektorat DIY menentukan waktu untuk menyampaikan pesan?
	i. Bagaimana evaluasi yang dilakukan dari program yang dijalankan	I1. Bagaimana evaluasi atas program yang akan dilakukan?
Aspek-aspek dalam perencanaan komunikasi (Cangara, 2013) *"Techniques for Effective Communication"* dalam (Effendy, 2009)	a. *To secure understanding*, seorang komunikator harus memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dipahami oleh komunikan	A1. Bagaimana cara Inspektorat DIY memastikan bahwa pesan yang telah disampaikan dapat dipahami oleh komunikan?
	b. *To establish acceptance*, melakukan pendampingan atau	B1. Apakah terdapat pendampingan atau

	pembinaan kepada komunikan c. *To motivate action*, pada akhirnya komunikan termotivasi	pembinaan? Jika ada bagaimana caranya? C1. Setelah strategi tersebut dijalankan bagaimana efek yang ditimbulkan dari komunikan?
Program strategi komunikasi yang dapat dilakukan (Subarjono *et al*, 2012)	8) Meningkatkan penggunaan media massa sebagai sarana komunikasi dan media PBAK 9) Memfasilitasi kegiatan komunikasi komunitas antikorupsi di lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat luas 10) Mendorong pembentukan dan pengembangan wahana dan komunitas antikorupsi 11) Mengoptimalkan kualitas dan kuantitas partisipasi dengan sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga pendidik 12) Pengembangan kerjasama jaringan kelembagaan komunikasi untuk mendorong efektivitas PBAK di lembaga negara serta di sektor swasta	A1. Media massa apa yang digunakan Inspektorat DIY? B1. Kegiatan apa saja yang difasilitasi oleh Inspektorat DIY? C1. Apa saja yang dilakukan Inspektorat DIY dalam hal pembentukan dan pengembangan kegiatan komunitas antikorupsi? D1. Apakah terdapat kegiatan yang melibatkan partisipasi dengan sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga pendidik? Jika ada, apa saja kegiatannya? E1. Apakah terdapat kerjasama dengan lembaga negara dan sektor swasta untuk mendorong efektivitas PBAK?

	13) Meengoptimalkan kesadaran akan kejujuran (integritas) dan internalisasi nilai-nilai anti korupsi 14) Meningkatkan kesadaran masyarakat maupun komunitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui whistleblower dan justice collaborator	F1. Apa kegiatan yang dilakukan untuk menginternalisasi nilai-nilai anti korupsi? G1. Apa yang dilakukan Inspektorat DIY untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui *whistleblower dan justice collaborator?*

TRANSKRIP WAWANCARA

1. Nama : Bernardinus Norowisnu, S.Kom., M.Hum
   Jabatan : Kepala Sub Bagian Program dan Monitoring Evaluasi

   1. Apa visi dan misi Inspektorat DIY?
      N : Saat ini instansi atau dinas tidak memiliki visi misi, yang ada adalah visi misi Gubernur. Semua program kegiatan instansi atau dinas harus mendukung visi misi dari Kepala Daerah. Visi Gubernur DIY 2022-2027 adalah “mewujudkan pancamulia masyarakat jogja melalui reformasi kalurahan, pemberdayaan kawasan selatan, serta pengembangan budaya inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi" sesuai dengan yang ada di RPJMD DIY 2022-2027. Inspektorat DIY mengawal visi Gubernur dari sisi pengawasan yaitu menjamin semua program dan kegiatan suatu instansi atau dinas di DIY terlaksana sesuai dengan yang sudah direncanakan.
   2. Apa tugas dan fungsi pokok dari Inspektorat DIY?
      N : Tugas dan fungsinya sesuai dengan Pergub DIY, membantu Gubernur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah
   3. Bidang mana yang mengampu program PAK dan MCP di Inspektorat DIY?

N : Program PAK dan MCP diampu oleh sekretariat khususnya pada sub bagian program dan monitoring evaluasi

4. Apakah komunikasi berperan penting dalam setiap kegiatan yang dilakukan pada program MCP dan PAK?

   N : Iya, pada program ini memiliki unsur mengajak, memberi pemahaman, dan terdapat unsur “memaksa”. Jadi dibutuhkan metode yang tepat

Program Penyuluh Anti Korupsi (PAK)

1. Apa yang melatarbelakangi adanya program PAK?

   N : Dasar dari “trisula” pemberantasan korupsi yaitu penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Dari sisi pendidikan dahulu dianggap masih belum terlihat, sehingga karena sumber daya KPK terbatas, maka perlu partisipasi dari banyak orang. Jadi konsep sertifikasi penyuluh anti korupsi dibuat untuk membantu dari sisi pendidikan ke masyarakat. Di setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing, di Jogja diberi nama PAKSIJI Sahabat Integritas Jogja Istimewa

2. Kegiatan apa saja yang telah dilakukan pada program PAK?

   N : Berbagai penyuluhan seperti kemarin ada penyuluhan anti korupsi terhadap seniman, penyuluhan dalam bentuk puisi yang bersemangatkan anti korupsi. Jadi banyak kegiatan penyuluhan untuk pengembangan kapasitas dengan mengundang narasumber dari berbagai bidang keahlian. Untuk lebih lengkapnya bisa melihat di Instagram pak_siji_diy

3. Media apa saja yang digunakan pada program tersebut? Adakah alasan tersendiri mengapa memilih media tersebut?

   N : Media yang kami gunakan ada puisi, permainan, worshop. Alasannya biar memudahkan target sosialisasi untuk dapat menerima dan mencerna pesan-pesan yang akan disampaikan sesuai dengan karakternya masing-masing.

4. Pesan apa yang ingin disampaikan pada kegiatan tersebut?

   N : Untuk menanamkan prinsip-prinsip antikorupsi

5. Apakah terdapat kegiatan atau program khusus untuk meningkatkan pengetahuan terhadap *whistleblower dan justice collaborator?*

   N : Biasanya pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan ada pembahasan yang menyinggung whistleblower dan justice collaborator

6. Apakah terdapat kata kunci pada pesan yang disampaikan? (Jargon)

   N : Kalau dari penamaan PAKSIJI sendiri sudah memiliki kekhasan. PAKSIJI Penyuluh Anti Korupsi Sahabat Integritas Jogja Istimewa

7. Pada pelaksanaan kegiatan, bagaimana Inspektorat DIY menentukan komunikator atau narasumber?

   N : Narasumber sudah disusun jadwal giliran

8. Bagaimana Inspektorat DIY menentukan waktu untuk melaksanakan program tersebut? (apakah dalam rangka memperingati hari tertentu)

   N : Biasanya memang disesuaikan dengan momen-momen yang berkaitan, khususnya peringatan hari-hari tertentu, misalnya hari Pendidikan Nasional, Hari Kebangkitan Nasional, Hari Anti Korupsi Sedunia
9. Siapa saja yang menjadi target audiens dalam kegiatan-kegiatan tersebut?

   N : Seluruh kalangan masyarakat, tentunya dilakukannya secara bertahap, sesuai kemampuan dan sumber daya yang ada
10. Apakah sebelum menentukan target audiens, terlebih dahulu melakukan penelitian atau identifikasi terhadap masyarakat dan organisasi yang akan menjadi target?

    N : Tidak ada penelitian yang dilakukan secara spesifik, tapi biasanya ada masukan atau menangkap isu-isu yang berkembang di masyarakat, biasanya kami berdasarkan segmentasi profesi, lalu juga berdasarkan dari kelompok masyarakat tertentu
11. Apa alasan memiliih target audiens tersebut?

    (mungkin berdasarkan faktor pekerjaan, pendidikan, usia, dsb)

    N : biasanya kami berdasarkan segmentasi profesi, lalu juga berdaasarkan dari kelompok masyarakat tertentu
12. Setelah menyampaikan pesan, Apakah terdapat pendampingan atau pembinaan yang dilakukan? Jika ada bagaimana caranya?

    N : Komunitas PAKSIJI sendiri sesuai dengan semangat pembentukannya yang biasanya kami selalu terbuka dalam melakukan pendampingan dan pembinaan melalui sekretariat
13. Bagaimana cara Inspektorat DIY memastikan bahwa pesan yang telah disampaikan dapat dipahami oleh komunikan? (Mungkin, dengan adanya pre test dan post test)

    N : Kalau sampai saat ini, cara pengukuran yang seperti pre-post test belum diterapkan sebagai standar, jadi kami masih memperhitungkan antusiasme peserta dalam menerima tema antikorupsi ini
14. Bisa dijelaskan apa saja yang menjadi target capaian dalam melaksanakan kegiatan program tersebut?

    N : Untuk sementara ini target capaiannya, menjangkau seluas-luasnya masyarakat untuk mendapatkan sosialisasi terkait masalah korupsi
15. Adakah cara tertentu untuk memastikan bahwa target capaian tersebut dapat tercapai? (mungkin karena sebelumnya sudah melakukan observasi dan identifikasi terhadap kondisi masyarakat/organisasi)

N : Sesuai dengan target yang ada, jadi ketika setiap kegiatan itu terlaksana sesuai rencana, maka targetnya kami katakan tercapai. Contohnya saat ini kegiatan PAKSIJI semakin berkembang

16. Bagaimana evaluasi atas program yang dilakukan?

    N : Secara internal PAK sering melakukan pertemuan yang di dalamnya termasuk melakukan evaluasi dari kegiatan yang sudah terlaksana, nantinya bisa untuk bahan perbaikan untuk kegiatan selanjutnya

17. Siapa saja pihak yang menyusun perencanaan?

    N : Perencanaan itu diampunya oleh Sekretariat Inspektorat DIY melalui Subbag Program dan Monev, itu semua harus ada data dukung dari berbagai stakeholder

18. Apakah pelaksanaan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat?

    N : Sampai saat ini, pelaksanaan kegiatan yang kami lakukan sesuai dengan perencanaan yang dibuat

19. Apakah Inspektorat DIY membuat rencana cadangan untuk mengantisipasi kemungkinan yang dapat terjadi, apabila pada tahap pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan?

    N : Rencana cadangannya biasanya terkait dengan tema dan segmen yang kami sasar

20. Bagaimana pemberian fasilitas serta sarana prasarana untuk kegiatan PAKSIJI?

    N : Disesuaikan dengan regulasi dan kemampuan keuangan daerah, fasilitas yang memang dibutuhkan PAKSIJI bisa diberikan

21. Hal apa yang dilakukan untuk mendorong atau mengembangkan komunitas PAKSIJI?

    N : Dukungan dari anggaran dan sarana prasarana pendukung, lalu pengembangan kompetensi

22. Apakah PAKSIJI melakukan kerjasama dengan lembaga atau sektor swasta?

    N : Iya, biasanya PAKSIJI diundang untuk menjadi narasumber di kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan anti korupsi seperti dinas kesehatan pada saat ada pegawai baru, dan banyak instansi yang mengundang untuk menjadi narasumber.

23. Apa saja faktor pendukung dalam pelaksanaan program-program PAKSIJI?

    N : Adanya penghargaan dari KPK membuat semangat para penyuluh untuk melaksanakan berbagai program kegiatan penyuluhan. Selain itu dari sisi perkembangan teknologi bisa memudahkan kami untuk melakukan berbagai kegiatan-kegiatan program PAKSIJI

24. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan program-program PAKSIJI?

    N : Adanya unsur pimpinan KPK yang diduga terlibat pada kasus pemerasan dan gratifikasi yang ditangani KPK, dikhawatirkan berdampak pada antusiasme masyarakat untuk mengikuti sosialisasi yang dilakukan PAKSIJI

Monitoring Center For Prevention (MCP)

1. Apa yang melatarbelakangi adanya program MCP?

   N : Yang melatar belakangi adanya program MCP karena masih tingginya tingkat korupsi di Indonesia dilihat dari Indek Persepsi Korupsi jadi dirasa perlu suatu langkah agar pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat berjalan dengan baik. Harapannya MCP dapat menjadi *tools* yang dapat digunakan oleh Pemda untuk menilai sejauh mana keberhasilan implementasi perbaikan tata kelola pemerintahan selama kurun waktu 1 tahun
2. Bagaimana kelompok kerja pada program MCP? Dan siapa saja?

   N : Sebagaimana tugas dan fungsi KPK dalam koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan korupsi dan juga instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik, jadi KPK membentuk MCP di setiap Pemda dengan menggandeng Inspektorat sebagai koordinator di setiap daerah. Kelompok kerjanya adalah Inspektorat selaku kordinator MCP KPK di daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengampu MCP KPK adalah BPKA, BKD, Dinas Penanaman Modal dan Perijinan, ULP, dll
3. Kegiatan apa saja yang telah dilakukan pada program MCP?

   N : Kami melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan dan kegiatan ini melalui Aplikasi MCP KPK
4. Media apa saja yang digunakan pada program tersebut?

   (baik pada saat koordinasi maupun pada tahap pelaksanaannya)

   N : Media yang digunakan adalah melalui Aplikasi MCP KPK, jadi MCP merupakan aplikasi yang di inisiasikan oleh KPK RI untuk melakukan monitoring ke setiap daerah. Jadi pemerintah daerah bisa langsung menyampaikan laporannya melalui aplikasi MCP ini sebelum nantinya tim dari KPK turun langsung ke daerah
5. Bagaimana Inspektorat DIY menentukan waktu untuk melaksanakan program MCP? (apakah dalam rangka memperingati hari tertentu)

   N : Evaluasi atas program capaian MCP KPK dilakukan setiap triwulan, dimana Inspektorat akan mengadakan evaluasi atas capaian pelaporan dari satuan kerja pengampu MCP KPK terkait 7 area intervensi dapat menyerahkan data dukungnya yang nanti akan dilakukan penilaian oleh KPK melalui aplikasi jaga.id

6. Siapa saja yang menjadi target sasaran pada program MCP?

   N : Yang menjadi sasaran target dalam MCP KPK adalah pada 7 area intervensi yaitu, perizinan, pengadaan barang dan jasa, perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), manajemen Aparatur Sipil Negara, manajemen aset daerah, dan optimalisasi pajak daerah
7. Setelah menyampaikan pesan, Apakah terdapat pendampingan atau pembinaan yang dilakukan? Jika ada bagaimana caranya?

   N : Terkait pendampingan dilakukan oleh inspektorat melalui rapat koordinasi bersama dan melalui sosialisasi, atau kami juga biasa menerima pertanyaan melalui whatsapp Inspektorat
8. Bisa dijelaskan apa saja yang menjadi target capaian dalam kegiatan program MCP?

   N : Tercapainya tujuh area intervensi tersebut
9. Bagaimana evaluasi atas program yang dilakukan?

   N : Evaluasi dilakukan atas capaian target penilaian atas 7 area intervensi yang dilaporkan oleh OPD pengampu intervensi pada saat evaluasi yang dilaksanakan setiap triwulan. Jadi kami akan mengevaluasi setiap triwulan, bahan evaluasi kami berdasarkan dari laporan yang diberikan dari OPD pengampu intervensi.
10. Apakah terdapat cara atau pedoman yang digunakan untuk menyusun perencanaan dalam program MCP?

    N : Ada pedoman yang diterbitkan oleh KPK
11. Siapa saja pihak yang menyusun perencanaan?

    N : Mendasar pada pedoman MCP dari KPK kemudian Inspektorat melakukan koordinasi dengan opd terkait untuk pemenuhan bukti dukung yang dibutuhkan.
12. Apakah pelaksanaan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat?

    N : Secara umum pelaksanaan sudah sesuai dengan perencanaan,
13. Apa saja faktor pendukung dalam pelaksanaan program MCP?

    N : Telah dilakukan secara sistem dan berkala serta terus menerus kami monitor
14. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan program MCP?

    N : Banyaknya kegiatan lain yang harus kami selesaikan selain pemenuhan pada program MCP

2. Nama : Totok Purwoirawan, S.Km.M.Acc.
   Jabatan : Sekretaris

1. Apa visi dan misi Inspektorat DIY?
   N : Sesuai dengan regulasi, saat ini tidak ada visi dan misi Instansi atau perangkat daerah, yang ada adalah visi dan misi Kepala Daerah yang termuat dalam RPJMD
2. Bidang mana yang mengampu program PAK dan MCP di Inspektorat DIY?
   N : program PAK dan MCP dilaksanakan oleh sub bagian program dan monitoring evaluasi
3. Apakah komunikasi berperan penting dalam setiap kegiatan yang dilakukan pada program MCP dan PAK?
   N : Ya, komunikasi sangat penting karena MCP dan PAK melibatkan Perangkat Daerah/ Lembaga lain yang terkait, tidak hanya dilaksanakan oleh Inspektorat saja sehingga dibutuhkan pemilihan strategi komunikasi yang tepat

Program Penyuluh Anti Korupsi (PAK)

1. Apa yang melatarbelakangi adanya program PAK?
   N : Sumber daya yang dimiliki KPK sangat terbatas untuk memberikan pendidikan anti korupsi, sehingga membutuhkan peran serta dari masyarakat. Keberadaan PAK menjadi wujud kolaborasi energi pemberantasan korupsi dalam membangun negeri yang berbudaya antikorupsi
2. Kegiatan apa saja yang telah dilakukan pada program PAK?
   N : Kegiatan yang telah kami lakukan cukup banyak seperti, seminar, sosialisasi, penyuluhan, launching buku anti korupsi, launching kumpulan puisi anti korupsi, pengembangan kapasitas masyarakat dengan narasumber dari berbagai bidang keahlian. Lengkapnya ada di Instagram pak_siji_diy
3. Media apa saja yang digunakan pada program tersebut? Adakah alasan tersendiri mengapa memilih media tersebut?
   N : Programnya seperti seminar, sosialisasi, puisi, permainan, workshop dan pameran. Alasannya kami sesuaikan dengan karakteristik peserta, media tersebut dilaksanakan yang paling tepat, sehingga tujuan pendidikan anti korupsi dapat diterima oleh peserta.
4. Pesan apa yang ingin disampaikan pada kegiatan tersebut?
   N : Pesannya adalah budaya anti korupsi itu perlu untuk ditanamkan kepada setiap pegawai dan juga masyarakat. Harapannya dengan begitu masyarakat mengetahui tentang nilai-nilai, bahaya dari korupsi, dan bisa menyebarkan pesan tersebut ke lebih banyak orang. Jadi akan lebih banyak masyarakat yang memahaminya dan diterapkan dikehidupan sehari-hari

5. Apakah terdapat kegiatan atau program khusus untuk meningkatkan pengetahuan terhadap *whistleblower dan justice collaborator?*

   N : Ada, kami melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait dengan aplikasi Wistleblowing System (WBS) yang ada di Pemda DIY. Bisa dilihat di website lapor.jogjaprov.go.id, dengan fokus pesan yang ingin kami sampaikan untuk tidak takut melapor karena terdapat jaminan atas kerahasiaan dan keamanan untuk whistleblower.
6. Apakah terdapat kata kunci pada pesan yang disampaikan? (Jargon)

   N : PAK SIJI : Penyuluh Anti Korupsi Sahabat Integritas Jogja Istimewa dan Sahabat Integritas: Jujur, Berani, Beraksi. Disertai gerakan tangan tertentu, untuk menambah semangat para penyuluh
7. Bagaimana Inspektorat DIY menentukan waktu untuk melaksanakan program tersebut? (apakah dalam rangka memperingati hari tertentu)

   N : Biasanya disesuaikan dengan momen-momen tertentu, misalnya Hari Anti Korupsi Sedunia atau HAKORDIA, hari Pendidikan Nasional, Hari Kebangkitan Nasional, RA Kartini, dan sebagainya
8. Siapa saja yang menjadi target audiens dalam kegiatan-kegiatan tersebut?

   N : Target audiens adalah seluruh kalangan masyarakat, termasuk kelompok-kelompok masyarakat. Target audiens disesuaikan dengan tema acara dan dilakukan secara bertahap sesuai sumber daya yang ada
9. Apakah sebelum menentukan target audiens, terlebih dahulu melakukan penelitian atau identifikasi terhadap masyarakat dan organisasi yang akan menjadi target?

   N : Belum pernah melakukan penelitian yang spesifik, namun biasanya berdasarkan masukan atau adanya masalah/ isu-isu yang ada di masyarakat
10. Apa alasan memiliiih target audiens tersebut?

    N : Biasanya dasar kami untuk menentukan target audiens melihat dari pekerjaan atau profesi, kelompok masyarakat, kelompok rentan dan usia. Kalau usia biasanya kami targetkan anak sekolah
11. Setelah menyampaikan pesan, Apakah terdapat pendampingan atau pembinaan yang dilakukan? Jika ada bagaimana caranya?

    N : PAK SIJI selalu siap melakukan pendampingan dan pembinaan dengan membuka diskusi dan konsultasi melalui sekretariat
12. Bagaimana cara Inspektorat DIY memastikan bahwa pesan yang telah disampaikan dapat dipahami oleh komunikan?

    N : Sampai dengan sekarang, pengukuran melalui pre/post test belum diterapkan untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta dalam menerima pendidikan antikorupsi. Tapi biasanya kami selalu ada sesi tanya jawab untuk peserta.

13. Bisa dijelaskan apa saja yang menjadi target capaian dalam melaksanakan kegiatan program tersebut?

    N : Target capaiannya adalah menjangkau seluas-luasnya seluruh kalangan Masyarakat terkait anti korupsi, secara bertahap dan prioritas sesuai dengan kemampuan PAKSIJI

14. Adakah cara tertentu untuk memastikan bahwa target capaian tersebut dapat tercapai?

    N : Seringnya dilaksanakan kegiatan PAKSIJI yang melibatkan berbagai kalangan masyarakat. Misalnya pelajar maupun guru-guru di lingkungan DIY

15. Bagaimana evaluasi atas program yang dilakukan?

    N : Secara rutin dan juga pasca kegiatan, PAK selalu melakukan pertemuan yang didalamnya termasuk melakukan evaluasi atas kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga dapat dilakukan perbaikan untuk kegiatan berikutnya

16. Siapa saja pihak yang menyusun perencanaan?

    N : Perencanaan di tingkat Inspektorat DIY diampu oleh Sekretariat Inspektorat DIY dan Subbag Program dan Monev

17. Apakah pelaksanaan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat?

    N : Pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan perencanaan yang dibuat

18. Apakah Inspektorat DIY membuat rencana cadangan untuk mengantisipasi kemungkinan yang dapat terjadi, apabila pada tahap pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan?

    N : Selama ini pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan perencanaan karena biasanya perencanaan sudah disusun secara matang mulai dari penentuan audiens, tema yang dipilih, hingga waktu pelasanaan. Hal yang mungkin tidak sesuai dengan perencanaan justru pada narasumber. Terkadang narasumber yang telah ditentukan berhalangan hadir, sehingga narasumber tersebut diganti dengan narasumber yang lain. Kami memiliki list daftar narasumber yang gunanya sebagai urutan jadwal untuk melakukan penyuluhan.

19. Bagaimana pemberian fasilitas serta sarana prasarana untuk kegiatan PAKSIJI?

    N : Pemberian fasilitas terhadap PAKSIJI selama ini diberikan dalam bentuk fasilitasi atau pembiayaan kegiatan sesuai dengan kemampuan daerah, untuk sarana prasarana maka Inspektorat DIY memberikan ruangan untuk sekretariat PAK SIJI

20. Hal apa yang dilakukan untuk mendorong atau mengembangkan komunitas PAKSIJI?

N : Dukungan fasilitasi anggaran, sarana prasarana pendukung serta pengembangan kompetensi anggota PAKSIJI

21. Apakah PAKSIJI melakukan kerjasama dengan lembaga atau sektor swasta?

    N : Sesuai dengan latar belakang terbentuknya adanya PAK yaitu peran serta masyarakat dalam pendidikan anti korupsi, maka PAKSIJI dapat melakukan Kerjasama dengan Lembaga, sektor swasta atau institusi manapun untuk dapat mendukung tercapaianya tujuan organisasi, sesuai dengan aturan di PAKSIJI

Monitoring Center For Prevention (MCP)

1. Apa yang melatarbelakangi adanya program MCP?

   N : Yang melatarbelakangi, penindakan korupsi selama ini belum membuat efek jera kepada pelaku korupsi jadi dibutuhkan suatu sistem pencegahan. MCP menjadi bentuk implementasi mitigasi atas resiko korupsi melalui pemantauan perbaikan dalam 7 area rawan korupsi

2. Bagaimana kelompok kerja pada program MCP? Dan siapa saja?

   N : Area intervensi MCP meliputi perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu atau perizinan, kapabilitas APIP, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola keuangan desa. Sehingga kelompok kerja untuk melaksanakan MCP adalah Perangkat Daerah yang terkait dengan area-area tersebu

3. Kegiatan apa saja yang telah dilakukan pada program MCP?

   N : Koordinasi dengan Perangkat Daerah yang terkait 7 area intervensi. Dan kami memiliki aplikasi untuk pengumpulan data dan pengisian kelengkapan namanya aplikasi jaga.id

4. Media apa saja yang digunakan pada program tersebut?

   (baik pada saat koordinasi maupun pada tahap pelaksanaannya)

   N : Media yang digunakan berupa sosialisasi dan rapat koordinasi. Sosialisasi kami lakukan untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan pemahaman tentang penilaian atas area-area intervensi MCP. Dan rapat koordinasi dillaksanakan untuk mengkoordinasikan pemenuhan dokumen yang dibutuhkan, masalah yang ditemukan serta koordinasi terkait timeline pengisian di aplikasi jaga.id

5. Pada Program MCP, bagaimana Inspektorat DIY menentukan komunikator atau narasumber?

   N : Penyampaian materi disampaikan oleh bidang pengampu yaitu di bidang sub bagian program dan monev

6. Bagaimana Inspektorat DIY menentukan waktu untuk melaksanakan program MCP? (apakah dalam rangka memperingati hari tertentu)

N : Untuk melaksanakan program dalam MCP tidak terkait dengan peringatan hari tertentu, tapi disesuaikan dengan tugas masing-masing instansi yang mengampu area intervensi juga disesuaikan dengan jadwal input pemenuhan dokumen di aplikasi jaga.id

7. Siapa saja yang menjadi target sasaran pada program MCP?

   N : Target sasarannya adalah Perangkat Daerah pengampu 7 area intervensi tersebut

8. Pesan apa yang ingin disampaikan pada kegiatan tersebut?

   N : Pembahasannya seputar penilaian MCP, bukti dukung, masalah yang ditemukan dalam melengkapi bukti dukung dan penyamaan persepsi mengenai penilaian MCP

9. Setelah menyampaikan pesan, Apakah terdapat pendampingan atau pembinaan yang dilakukan? Jika ada bagaimana caranya?

   N : Pendampingan dan pembinaannya dalam bentuk rapat koordinasi, karena penilaian MCP ditujukan untuk penilaian Tingkat pemda sehingga dibutuhkan kolaborasi yang baik antar Perangkat Daerah pengampu area intervensi

10. Bisa dijelaskan apa saja yang menjadi target capaian dalam kegiatan program MCP?

    N : target kami bisa mendorong pemerintah daerah dapat melakukan transformasi nilai dan praktek pemerintahan daerah dalam 7 area tersebut

11. Bagaimana evaluasi atas program yang dilakukan?

    N : Evaluasi Inpektorat mendasar dari evaluasi yang dilakukan oleh tim MCP KPK dengan memberikan feedback dari dokumen-dokumen pendukung yang telah diunggah di jaga.id dan nanti akhirnya memberikan nilai MCP untuk Pemda DIY. Nantinya kami melaksanakan evaluasi bersama setiap triwulan.

12. Apakah terdapat cara atau pedoman yang digunakan untuk menyusun perencanaan dalam program MCP?

    N : Pedoman disesuaikan dengan penilaian MCP yang ada di jaga.id

13. Siapa saja pihak yang menyusun perencanaan?

    N : Perencanaan di tingkat Inspektorat DIY diampu oleh Sekretariat Inspektorat DIY dan Subbag Program dan Monev

14. Apakah pelaksanaan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat?

    N : Pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan perencanaan yang dibuat

3. Nama : Maharyo Widanto, S.T., M.M.
   Jabatan : Inspektur Pembantu Sarana Prasarana

1. Apakah komunikasi berperan penting dalam setiap kegiatan yang dilakukan pada program MCP dan PAK?

   N : Komunikasi berperan penting karena dalam setiap kegiatan pada program MCP dan PAK yang merupakan kegiatan dengan tujuan untuk upaya preventif dan pencegahan korupsi, komunikasi sangat diperlukan. Bentuknya berupa sosialisasi, konsultasi, dan spreeding informasi biasanya melalui media banner, flyer, dan media sosial. Semua itu termasuk bentuk-bentuk komunikasi dalam mensukseskan program MCP dan PAK kepada masyarakat luas

Program Penyuluh Anti Korupsi (PAK)

1. Apa yang melatarbelakangi adanya program PAK?

   N : Masih tingginya Tingkat korupsi di Indonesia dilihat dari Indek Persepsi Korupsi jadi dirasa perlu suatu langkah agar pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat berjalan dengan baik. PAK memiliki peran strategis dalam memberi penerangan dan menggerakan masyarakat untuk mencegah korupsi dengan mengembangkan budaya anti korupsi

2. Kegiatan apa saja yang telah dilakukan pada program PAK?

   N : Pertemuan rutin para anggota PAK SIJI, sosialisasi melalui berbagai kegiatan seperti melalui pengenalan budaya anti korupsi melalui seni baca puisi, penyuluhan antikorupsi, dan lain-lain

3. Media apa saja yang digunakan pada program tersebut? Adakah alasan tersendiri mengapa memilih media tersebut?

   N : Media yang digunakan seperti instagram, youtube, lagu, penerbitan buku puisi antikorupsi, dan website PAK. Alasannya karena pemilihan media tersebut efektif dalam mengenalkan budaya anti korupsi dengan cara mempengaruhi orang setiap hari, setiap saat. Penerbitan buku sangat cocok bagi para siswa, akademisi dan budayawan dalam mengembangkan budaya antikorupsi tanpa menggurui. Jika website dirasa efektif karena saat ini media online dan internet memegang kendali dalam pencarian berbagai informasi dan pembelajaran.

4. Pesan apa yang ingin disampaikan pada kegiatan tersebut?

   N : Memberikan penerangan dan menggerakkan masyarakat untuk mencegah korupsi dengan mengembangkan budaya antikorupsi

5. Apakah terdapat kegiatan atau program khusus untuk meningkatkan pengetahuan terhadap *whistleblower dan justice collaborator?*

N : Melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan/ kursus dan fungsi consulting yang diemban oleh Inspektorat.

6. Pada pelaksanaan kegiatan, bagaimana Inspektorat DIY menentukan komunikator atau narasumber?

   N : Narasumber ditunjuk berdasarkan kapasitas dan pemahaman yang dimiliki dan juga berdasarkan dari pengalaman narasumber. Terdapat jadwal yang sudah disusun sehingga narasumber yang akan bertugas sesuai dengan giliran urutan yang sesuai dengan jadwal

7. Bagaimana Inspektorat DIY menentukan waktu untuk melaksanakan program tersebut? (apakah dalam rangka memperingati hari tertentu)

   N : Berdasarkan kebutuhan dan juga adanya permintaan dari pihak lain

8. Apa alasan memiliih target audiens tersebut?

   N : Biasanya dengan mengelompokkan target audiens dalam suatu acara sosialisasi, misalnya sosialisasi anti korupsi oleh PAK menyasar pada kelompok yang potensial dalam menyerap dan mempengaruhi berjalannya budaya anti korupsi, seperti kelompok pelajar, mahasiswa, dll

9. Bisa dijelaskan apa saja yang menjadi target capaian dalam melaksanakan kegiatan program tersebut?

   N : Tersampaikan subtstansi kegiatan kepada masyarakat dan berharap mereka akan dapat mempengaruhi sekitarnya dengan cara dan kemampuannya sendiri

10. Adakah cara tertentu untuk memastikan bahwa target capaian tersebut dapat tercapai?

    N : Saya melihat di Inspektorat DIY menjadi sering digunakan untuk kegiatan PAK

11. Apakah Inspektorat DIY membuat rencana cadangan untuk mengantisipasi kemungkinan yang dapat terjadi, apabila pada tahap pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan?

    N : Semua dijalankan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan, jika ada kondisi yang harus menuntut penyesuaian maka akan dilakukan revisi dan adjustment

12. Bagaimana pemberian fasilitas serta sarana prasarana untuk kegiatan PAKSIJI?

    N : Terdapat ruang sekretariat dan fasilitasi jika ada kegiatan yang terkait

13. Hal apa yang dilakukan untuk mendorong atau mengembangkan komunitas PAKSIJI?

    N : Melakukan aktivitas secara rutin dan menambah jumlah PAK atau master

14. Apakah PAKSIJI melakukan kerjasama dengan lembaga atau sektor swasta?

    N : Kerjasama dijalin dengan berbagai pihak, baik swasta, akademisi dan pemerintah

15. Apa saja faktor pendukung dalam pelaksanaan program-program PAKSIJI?

N: Komitmen pimpinan dan dukungan pimpinan dan staf dalam program PAKSIJI

16. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan program-program PAKSIJI?
    N: Karena banyaknya kegiatan-kegiatan di luar kegiatan penyuluhan yang harus diselesaikan

Monitoring Center For Prevention (MCP)

1. Apa yang melatarbelakangi adanya program MCP?
   N : Sebagai upaya untuk memonitor capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan
2. Bagaimana kelompok kerja pada program MCP? Dan siapa saja?
   N : Pokja dibagi berdasarkan dari delapan area intervensi yang telah ditetapkan
3. Kegiatan apa saja yang telah dilakukan pada program MCP?
   N : Monitoring dan evaluasi secara berkala
4. Media apa saja yang digunakan pada program tersebut?
   (baik pada saat koordinasi maupun pada tahap pelaksanaannya)
   N : Media online melalui zoom *meeting*, pertemuan secara luring dan media melalui aktivitas pemeriksaan/ pengawasan secara langsung
5. Bagaimana Inspektorat DIY menentukan waktu untuk melaksanakan program MCP? (apakah dalam rangka memperingati hari tertentu)
   N : Ada peta pemeriksaan tahunan dari pedoman Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) yang telah mengadopsi aktivitas MCP KPK dalam pelaksanaanya
6. Siapa saja yang menjadi target sasaran pada program MCP?
   N : Delapan area yang memiliki potensi terjadi kerawanan dalam pelaksnaannya termasuk yang memiliki interaksi langsung dalam proses pelayanan publik
7. Setelah menyampaikan pesan, Apakah terdapat pendampingan atau pembinaan yang dilakukan? Jika ada bagaimana caranya?
   N : Dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh berbagai pihak dan lembaga
8. Bisa dijelaskan apa saja yang menjadi target capaian dalam kegiatan program MCP?
   N : Tercapainya perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan tujuh area intervensi tersebut
9. Apakah terdapat cara atau pedoman yang digunakan untuk menyusun perencanaan dalam program MCP?
   N : Ada, dalam suatu aplikasi yang disebut jaga.id
10. Apakah pelaksanaan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat?

N : Tergantung dari banyak faktor, komitmen dan integritas kepala daerah dan pimpinan menjadi hal yang paling utama dan mendasar. Faktornya seperti terdapat banyak ketugasan lain yang bersifat rutin dan amanat kegiatan dari pusat yang mana kegiatan tersebut terkait dengan hal-hal lain

11. Apa saja faktor pendukung dalam pelaksanaan program MCP?

    N : Karena MCP merupakan kegiatan berkala sehingga dilakukan kegiatan monitoring secara sistem dan serta terus menerus. Dan informasi bisa secara cepat dengan pihak terkait melalui Whatsapp atau email

12. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan program MCP?

    N : Masih belum adanya kesepahaman dan komitmen pimpinan dalam menyikapi target dan tujuan yang telah ditetapka